

Menuju Kemandirian  
Anggaran

Hal 4

BPK Ungkap Penyebab  
Ketidakharmonisan di TVRI

Hal 15

BPK Resmikan  
Pembentukan IPKN

Hal 38



# Menjaga Pembangunan Konektivitas Infrastruktur



**T**TVRI menjadi sorotan lantaran pemecatan direktur utama Helmy Yahya pada 16 Januari 2020. Pemecatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas (Dewas) TVRI itu pun kemudian menjadi polemik lantaran Helmy merasa keberatan dengan pemecatan tersebut. Alasannya, pemecatan dirinya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP No 13/2005 tentang LPP TVRI. Di sisi lain, dewas juga merujuk pada PP yang sama untuk memecat Helmy. Berdasarkan PP tersebut, dewas menyatakan memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi.

Terkait dengan hal itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas efektivitas penerapan regulasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga penyiaran publik (LPP) TVRI dan LPP RRI ke DPR, Rabu (26/2). Dalam paparannya, BPK mengungkapkan sejumlah temuan signifikan yang perlu mendapat perhatian LPP TVRI dan LPP RRI.

Penyerahan LHP Kinerja atas TVRI dan RRI merupakan satu bagian dari beberapa isu yang diangkat *Warta Pemeriksa* pada edisi Februari 2020. Selain itu, redaksi juga menyajikan informasi mengenai kemandirian BPK di rubrik Sorotan.

Isu ini diangkat lantaran independensi menjadi salah satu temuan yang sering muncul saat pelaksanaan *peer review* atas BPK oleh lembaga pemeriksa negara lain. BPK dianggap belum independen dalam hal anggaran karena masih harus bergantung terhadap Kement-



terian Keuangan. Padahal, kemandirian anggaran amat penting untuk menunjang fungsi pemeriksaan.

Sementara dalam rubrik BPK Bekerja, redaksi menyajikan liputan mengenai pemeriksaan konektivitas tol laut dan infrastruktur transportasi darat, udara, dan perkeretaapian. Hal ini terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dicanangkan pemerintah yang menegaskan konektivitas sebagai salah satu prioritas.

Masih banyak liputan menarik yang redaksi sajikan pada edisi kali ini. Mulai dari wawancara tim redaksi dengan Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi. Kemudian juga liputan mengenai pengalaman pemeriksa perempuan BPK saat melakukan pemeriksaan di kilang minyak milik Pertamina. Silakan menikmati. ●

## TIM EDITORIAL

### Pengarah

Agung Firman Sampurna  
Agus Joko Pramono  
Bahrullah Akbar  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

### Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

### Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

### Sekretariat

Bestantia Indraswati  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Sudarman

### Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Faksimili: 021-57854096  
Email: wartabpkri@gmail.com  
www.bpk.go.id

### Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

## MENUJU KEMANDIRIAN ANGGARAN

- 4** BPK yang mandiri merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

- 8** PENTINGNYA INDEPENDENSI TERKAIT SDM

- 10** MENJAGA AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR

- 13** MENGAWAL KONEKTIVITAS DI DAERAH

## BPK UNGKAP PENYEBAB KETIDAKHARMONISAN DI TVRI

- 15** Penambahan wewenang dewan pengawas berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan kerja.

- 17** PROSES PEMERIKSAAN INFRASTRUKTUR

- 19** BPK BANTU SAO LAO KEMBANGKAN KUALITAS PEMERIKSAAN

## AUDITOR BPK BERBAGI ILMU DI PELATIHAN INTOSAI WGEI

- 20** Pelatihan itu bertujuan meningkatkan pemahaman mengidentifikasi risiko dan memilih topik pemeriksaan di area PSA.

- 22** **HENDRA SUSANTO,**  
ANGGOTA I/PIMPINAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA I BPK  
"MENGUBAH KETERBATASAN MENJADI TEROBOSAN"

- 24** **BUDI KARYA SUMADI,**  
MENTERI PERHUBUNGAN  
"PEMERIKSAAN BPK BANTU CEGAH KECURANGAN"

## KOMISI XI DUKUNG INDEPENDENSI ANGGARAN

- 7** BPK wajib memeriksa pemerintah dan lembaga negara lainnya terkait pengelolaan keuangan negara.



- 28** BELAJAR HAL BARU DI KILANG MINYAK

- 30** MENGUBAH RUMAH JADI *HOMESTAY*

- 33** MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DENGAN "PETERPAN"

- 35** ENAM JURUS BPK JAMBI MERAH WBK

- 37** AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI RAIH WBK

- 38** BPK RESMIKAN PEMBENTUKAN IPKN

## MEMAGARI AUDITOR LEWAT PENEGAKAN KODE ETIK

- 40** Penegakan kode etik amat bergantung pada setiap individu yang ada di BPK.

- 44** STRATEGI PROMOSI DIRI

- 47** BERITA FOTO





# Menuju Kemandirian Anggaran

BPK yang mandiri merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Independensi anggaran jadi salah satu temuan yang sering muncul saat pelaksanaan *peer review* atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh lembaga pemeriksa negara lain. BPK dianggap belum independen dalam hal anggaran karena masih harus bergantung terhadap Kementerian Keuangan. Padahal, kemandirian anggaran amat penting untuk menunjang fungsi pemeriksaan.

Atas dasar itulah BPK sedang mengupayakan agar memiliki kemandirian dalam hal anggaran. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan, hal tersebut jadi salah satu poin dari revisi UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang BPK. Revisi UU BPK bahkan telah ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) dan berada pada nomor urut 45.

“Salah satu revisi itu terkait anggaran. Ini bukan sesuatu yang didasari oleh keinginan, tapi kebutuhan untuk menjamin pelaksanaan tugas BPK, yaitu pemeriksa-

an. Hampir setiap *peer review*, salah satu yang jadi sorotan di kita adalah soal independensi di bidang anggaran. Saya pikir ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan,” kata Agung saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (18/2).

”

Ini bukan sesuatu yang didasari oleh keinginan, tapi kebutuhan untuk menjamin pelaksanaan tugas BPK.

Pria berdarah Palembang tersebut menambahkan, ada beberapa opsi bentuk independensi anggaran yang sedang dikaji dan didiskusikan. Salah satu formulasinya, penganggaran tetap melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, BPK bisa mengajukan anggaran secara langsung kepada DPR

seperti yang dilakukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Mekanisme yang sama kita harapkan dapat diterapkan kepada kita,” Agung berharap.

BPK juga sedang mempelajari model yang diterapkan lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Menurut Agung, SAI Selandia Baru bisa dijadikan *benchmark*.

SAI Selandia Baru diketahui memiliki badan layanan umum (BLU) yang bisa melakukan pemeriksaan terhadap entitas di luar entitas yang wajib diperiksa. “Dan dibayar,” kata Agung.

Berdasarkan bukti-bukti empiris, kata Agung, kemampuan pemeriksa BPK lebih unggul dari banyak SAI lainnya. “Jadi, kenapa kita tidak bisa memiliki operasi yang seperti mereka, melakukan pemeriksaan terhadap entitas swasta. Teman-teman di sini dididik dengan baik. Punya pengalaman dan dibekali bermacam sertifikasi,” kata Agung.

Menurut Agung, apa yang diterapkan SAI Selandia Baru bisa dijadikan salah satu pilihan. Namun demikian, ia mengakui BPK belum melakukan kajian secara menyeluruh terkait itu.

Di negara lain seperti Rusia, penganggaran untuk SAI dilakukan melalui mekanisme yang sama seperti di Indonesia. Bedanya, di sana tidak pernah ada perdebatan mengenai alokasi anggaran. “Kalau ada kebutuhan yang disampaikan BPK-nya, mereka pasti dibekukan dan langsung dipenuhi,” ujarnya.

Hal tersebut juga menjadi salah satu pemikiran BPK. Bisa saja, kata Agung, BPK terlebih dahulu melakukan pembahasan setengah kamar dengan beberapa pihak terkait alokasi anggaran. Sehingga, tidak ada lagi perdebatan saat anggaran resmi diajukan.

### Krusial

Independensi anggaran dapat menjamin independensi BPK. Dengan mandiri secara anggaran, BPK bisa lebih leluasa menentukan jumlah anggaran sesuai dengan jumlah pemeriksaan yang dibutuhkan.

Agung mengatakan, anggaran pemeriksaan BPK pada tahun ini berkurang sekitar Rp 100 miliar. Padahal, beban pemeriksaan meningkat setiap tahunnya seiring dengan terus bertambahnya nilai APBN. Belum lagi entitas yang diperiksa menjadi lebih kompleks dan lebih banyak.

Pada saat yang sama, anggaran yang dibutuhkan melakukan pemeriksaan ternyata dikurangi. Ia menyadari, BPK bisa

meminta bantuan kepada Kementerian Keuangan jika membutuhkan anggaran tambahan. “Namun ini *kan* mekanismenya jadi *gak* sehat. Ini bisa dibilang gangguan terhadap independensi,” ucap Agung.

Ia menegaskan, independensi anggaran sebetulnya juga bertujuan memperbaiki tata kelola keuangan negara secara keseluruhan. Dan yang pasti, kata Agung, independensi anggaran tidak berarti mengesampingkan prinsip akuntabilitas.

“BPK ingin anggaran lebih independen, bukan berarti kami tidak diawasi. Akuntabilitasnya tetap ada karena mekanisme pengawasan tetap ada. Tapi pada intinya, kita ingin tugas kita yang begitu berat setiap tahun itu dijamin oleh anggaran yang memadai,” kata Agung.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam kesempatan terpisah mengatakan, kemandirian anggaran sangat krusial. Sebab, kegiatan pemeriksaan memerlukan pendanaan.

Ia mengungkapkan, turunnya anggaran pemeriksaan BPK pada tahun ini pun berdampak pada kegiatan pemeriksaan. BPK terpaksa mengurangi jumlah pemeriksaan.

“Kita harus mengatur dan memilih pemeriksaan mana yang akan dijalankan dan tidak. Padahal seharusnya BPK memiliki keleluasaan,” kata Agus.

Agus sangat berharap BPK bisa lebih independen dalam hal anggaran. Apalagi, BPK yang mandiri merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Agus, setidaknya ada dua cara yang bisa diterapkan untuk mewujudkan kemandirian anggaran BPK. Cara pertama, dengan memperbesar anggaran untuk BPK. Kedua, dengan meletakkan anggaran pemeriksaan di entitas yang akan diperiksa BPK.

“Kita berharap ada bentuk pemroporsian anggaran tertentu yang memang berdasarkan mandat BPK. Kalau anggaran diturunkan, maka proses pemeriksaan akan melemah. Padahal, hanya BPK yang mempunyai mandat pemeriksaan yang sangat kuat di republik ini yang bisa memaksa, bisa memidanakan pihak-pihak yang tidak mau diperiksa.” ●

”

BPK ingin anggaran lebih independen, bukan berarti kami tidak diawasi. Akuntabilitasnya tetap ada karena mekanisme pengawasan tetap ada. Tapi pada intinya, kita ingin tugas kita yang begitu berat setiap tahun itu dijamin oleh anggaran yang memadai.

# Komisi XI Dukung Independensi Anggaran

BPK wajib memeriksa pemerintah dan lembaga negara lainnya terkait pengelolaan keuangan negara.

**K**etua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mendukung independensi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dito mengatakan, BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Dito, independensi BPK sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Ke depan, kami mendukung upaya-upaya independensi yang sedang disusun BPK,” kata Dito kepada *Warta Pemeriksa*, Kamis (13/2).

Dito menjelaskan, BPK wajib memeriksa pemerintah dan lembaga negara lainnya terkait pengelolaan keuangan negara. Dalam undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional.

“Ini sangat diperlukan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Dito.

Menurut Dito, kriteria bebas, mandiri, dan profesional berarti BPK merupakan lembaga yang berdiri terpisah dari pemerintah. Dia mengatakan, berdasarkan beleid tersebut, BPK tidak memiliki hubungan atasan atau bawahan dengan pemerintah. BPK, kata Dito, dipilih dan bertanggung jawab



■ Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto

kepada legislatif.

“Dengan demikian, upaya yang dilakukan BPK dalam mencapai independensi SDM dan anggaran merupakan langkah yang tepat saat ini, karena keinginan tersebut merupakan perintah yang diamanatkan dan dasar dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPK di dalam ketentuan perundang-undangan,” kata Dito.

Menurut Dito, diperlukan revisi UU nomor 15 tahun 2006 untuk memberikan dasar yang jelas dalam mewujudkan independensi BPK. Dia mengatakan, saat ini BPK belum independen dalam hal pelaksanaan pemenuhan SDM dan penganggaran. Dia mencontohkan, anggaran BPK masih harus diusulkan kepada menteri keuangan kemudian dibahas bersama dalam paket nota keuangan. “Hal ini menunjukkan independensi SDM dan anggaran BPK masih mengacu kepada pemerintah,” kata Dito.

Dito mengatakan, lembaga tinggi negara yang independen saat ini adalah Bank Indonesia. Bank sentral, menurut Dito, dapat menjadi acuan bagi BPK untuk mempersiapkan independensi. Selain itu, Dito juga berharap, BPK dapat mencari *benchmark* pelaksanaan tugas dan fungsi *supreme audit* di negara lain. “Sehingga, BPK memiliki gambaran komprehensif terhadap independensi SDM dan anggaran ke depan,” kata Dito.

Politisi Partai Golkar itu berharap, independensi BPK dapat mendukung tugas pemeriksaan menjadi lebih optimal. “Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam APBN tanpa ada intervensi dari menteri keuangan dan SDM BPK dapat memiliki perencanaan mandiri, sehingga terdapat fleksibilitas dalam merekrut dan memenuhi kebutuhan pegawai sesuai kompetensi dan jumlah yang diperlukan,” kata Dito. ●



Ketua Komisi II DPR menyarankan BPK mencari tolok ukur lembaga negara lain mencari *benchmark* dari negara lain yang saat ini sudah berhasil independen.

# Pentingnya Independensi Terkait SDM



”

Kita berharap ke depan BPK lebih independen dalam hal rekrutmen, dalam konteks peningkatan penilaian jabatan, dan seterusnya.

■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak hanya membutuhkan independensi dalam hal anggaran. Menurut Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, independensi dalam hal sumber daya manusia (SDM) juga tak kalah penting. Agus menjelaskan, secara teori ada dua unsur mengenai independensi. Yakni *independence in appearance* (independensi dalam penampilan) dan *independence in fact* (independensi dalam fakta).

Independensi dalam fakta amat bergantung pada setiap insan BPK dalam menjalankan tugasnya. Sikap independen harus tertanam dalam setiap diri auditor. Auditor mesti memiliki sikap kejujuran yang tinggi dan tidak mengesampingkan fakta.



Sementara, independensi dalam penampilan tampak dari struktur organisasi. Juga menyangkut mengenai pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. “*Independence in appearance* inilah yang sedang kita perjuangkan,” kata Agus kepada *Warta Pemeriksa* di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (18/2).

Berdasarkan konsep *independence in appearance*, kata Agus, para pemeriksa semestinya tidak punya keterkaitan dengan pemerintah. Hal itu pula yang menjadi acuan dalam Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF).

Jika mengacu pada konsep itu, maka BPK bisa dibilang tidak sepenuhnya independen dalam hal *independence in appearance*. Sebab, proses perekrutan SDM hingga proses penganggaran masih bergantung pada pemerintah. “Walaupun, orang-orang yang melaksanakannya ada di BPK. Tapi, dari sisi *independence in appearance*, tidak independen,” ucap Agus.

Kendati demikian, Agus menegaskan hal itu berbeda jika ditinjau dari sisi fakta. Ini karena independensi dalam fakta sangat bergantung kepada diri sendiri.

Pria yang merupakan doktor ilmu pemerintahan lulusan Universitas Padjajaran itu menegaskan, BPK berusaha tetap independen meski *independence in appearance* belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks pemeriksaan, BPK tetap mengelola pemeriksaan secara sendiri, membuat perencanaan sendiri, dan membuat pelaporan sendiri.

“Memang selama ini tidak pernah ada intervensi dari pemerintah terhadap independensi BPK kita secara *practical*. Tapi ukuran itu bukan cuma secara *practical*. Ada soal *in appearance* dan *in fact*. Tapi, kita berharap ke depan BPK lebih independen dalam hal rekrutmen, dalam konteks peningkatan penilaian jabatan, dan seterusnya,” kata Agus.

Meskipun pegawai BPK berstatus aparatur sipil negara (ASN), ia berharap BPK diberikan modal rekrutmen sendiri. Kemudian, diberikan keleluasaan dalam pembentukan struktur organisasi, penilaian jabatan dan kinerja, hingga tidak mengikuti *modelling* yang dibuat oleh pemerintah.

“Misalnya kalau kita masih ASN lalu ada *job biding*, pertanyaannya siapa yang boleh masuk? Pemerintah juga boleh masuk. Tapi kalau kita sendiri, maka orang ini harus keluar dulu. Titik itu yang kita ingin dapat independensinya.”



### Saran DPR

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, wacana independensi BPK sejalan dengan arah peningkatan profesionalitas lembaga negara saat ini. Menurut Doli, rekrutmen pegawai dan penganggaran BPK semestinya dilakukan secara mandiri untuk mewujudkan fungsi kerja sama dan koordinasi yang seimbang.

“Kalau sekarang satu lembaga negara dengan lembaga negara lain, yang satu itu men-*support* kan justru seolah-olah menjadi subordinatnya. Padahal tidak perlu bergantung satu sama lain,” kata Doli kepada *Warta Pemeriksa*.

Doli mengatakan, BPK saat ini perlu mempersiapkan langkah-langkah untuk mewujudkan kemandirian tersebut, termasuk menyiapkan sistem atau pola kerjanya. Doli juga menyarankan BPK untuk mencari *benchmark* dari lembaga negara lain yang saat ini sudah berhasil independen.

“Bisa dilihat bagaimana mereka membangun sistem itu,” kata Doli.

Doli mengatakan, independensi akan membuat kinerja lembaga pemeriksa keuangan negara menjadi lebih baik. Menurut Doli, upaya BPK untuk menilai secara objektif akan terhambat dengan ketergantungannya pada lembaga lain.

“Kalau misalnya BPK menjadi independen, maka memang wajib dan sudah seharusnya dia menjadi lembaga yang lebih profesional dan tingkat akuntabilitasnya lebih tinggi,” kata Doli.

Doli berharap, BPK yang lebih kuat juga akan membantu kinerja DPR dalam fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan pemerintah. ●

Ketua Komisi II  
DPR RI, Ahmad  
Doli Kurnia.



# Menjaga Akuntabilitas Pembangunan Konektivitas Infrastruktur

Tujuan umum peningkatan konektivitas adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari segi biaya dan waktu.

**P**emerintah sedang gencar membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas. Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Auditorat Keuangan Negara I telah melaksanakan pemeriksaan terkait konektivitas.

Melalui pemeriksaan pada Kementerian Perhubungan, AKN I memberikan sumbangsih dalam memeriksa akuntabilitas dan keuangan negara pada kepelabuhanan, kebandarudaraan, maupun perkeretaapian. "Pemeriksaan yang telah dilakukan di antaranya konektivitas tol

laut dan infrastruktur transportasi darat, udara, dan perkeretaapian," kata Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto kepada *Warta Pemeriksa*.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah sudah menegaskan konektivitas sebagai salah satu prioritas. Di dalamnya, Kementerian Perhubungan turut serta sebagai pelaksana dalam beberapa proyek prioritas strategis, seperti kereta api kecepatan tinggi di Jawa, jaringan pelabuhan utama terpadu, sistem angkutan umum massal perkotaan, serta jembatan udara 37 rute di Papua.

”

Pemeriksaan yang telah dilakukan di antaranya konektivitas tol laut dan infrastruktur transportasi darat, udara, dan perkeretaapian.



Hendra mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan AKN I ke depannya akan menitikberatkan pada proyek prioritas strategis tersebut. Meski begitu, Hendra mengatakan, akan disusun sejumlah pemeriksaan tematik terkait konektivitas yang melibatkan seluruh auditorat dengan masing-masing portofolio.

Salah satu pemeriksaan mengenai konektivitas yang telah dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan yaitu Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tol Laut, dengan simpulan masih belum optimal. Salah satunya terkait keberadaan basis data pelabuhan.

Selain itu, terdapat fokus tentang Penguatan Konektivitas Nasional Darat, Udara, Dan Perkeretaapian dengan simpulan masih belum optimal. Hal itu terutama terkait mekanisme perencanaan, sarana prasarana dan infrastruktur transportasi, serta penetapan rute pelayanan kegiatan subsidi.

BPK juga melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan dengan menyoroti di antaranya, pemeriksaan belanja barang dan belanja modal serta denda keterlambatan pekerjaan pada tujuh Eselon I Kementerian Perhubungan. Selain itu, BPK juga me-

lakukan pemeriksaan PNPB atas biaya penggunaan prasarana perkeretaapian atau *track access charge* (TAC) pada Ditjen Perkeretaapian.

“Sasaran pemeriksaan tersebut tidak didesain secara langsung untuk mengukur konektivitas alur transportasi, namun BPK menyoroti kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program Kementerian Perhubungan,” kata Hendra.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan konsesi pelabuhan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yaitu PT Pelindo II (Persero) dan PT Pelindo III (Persero), dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak 2016 hingga semester I 2017.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan, terkait dengan aspek perencanaan strategis konsesi pelabuhan, penentuan tarif dan jangka waktu konsesi pelabuhan, pelaksanaan tanggung jawab Kemenhub dan Otoritas Pelabuhan (OP) dalam penerapan konsesi, dan penatausahaan PNPB atas konsesi.



■ *Entry meeting* pemeriksaan LK di Kementerian Perhubungan. Anggota I BPK, Hendra Susanto, berharap komunikasi antara pemeriksa dan entitas yg diperiksa dapat berlangsung dengan baik, agar proses pemeriksaan pun berjalan dengan lancar.

Sasaran pemeriksaan dalam pemeriksaan kinerja tersebut adalah kegiatan perencanaan konsesi, penyusunan perjanjian konsesi pelabuhan, dan implementasi konsesi. BPK menyimpulkan, pengelolaan konsesi pelabuhan belum efektif ditinjau dari aspek perencanaan strategis, penentuan tarif dan jangka waktu konsesi, pelaksanaan tanggung jawab Kemenhub, dan penatausahaan PNBP konsesi.

BPK kemudian merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar meninjau kembali besaran tarif konsesi melalui studi kelayakan untuk memastikan tarif konsesi sesuai dengan prinsip keadilan, menguntungkan semua pihak, dan mencerminkan persaingan yang sehat.

Menurut Hendra, tujuan umum peningkatan konektivitas adalah me-

ningkatkan efisiensi dan efektivitas baik dari segi biaya dan waktu. Selain itu, ujaranya, tujuan utama konektivitas adalah percepatan dan pemerataan pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan, BPK mendukung upaya pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 dengan melakukan pemeriksaan sesuai dengan visi BPK yaitu Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara. "BPK dalam rancangan teknokratik telah mengarahkan program pemeriksaan sesuai RPJMN melalui pemeriksaan kinerja tematik untuk menilai kinerja program pemerintah yang salah satunya adalah konektivitas," kata Hendra. ●



Sasaran pemeriksaan tersebut tidak didesain secara langsung untuk mengukur konektivitas alur transportasi, namun BPK menyoroti kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program Kementerian Perhubungan.

## Hasil Pemeriksaan Terkait Konektivitas Secara Umum

1 Pengelolaan dan penyelenggaraan tol laut masih belum optimal, salah satunya terkait keberadaan basis data pelabuhan.

3 Pengelolaan PNBP atas jasa kepelabuhanan dan jasa kebandarudaraan belum sesuai ketentuan.

5 Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan belanja barang dan belanja modal serta denda keterlambatan pekerjaan pada tujuh eselon I Kementerian Perhubungan.

2 Transportasi darat, udara, dan perkeretaapian masih belum optimal, terutama terkait mekanisme perencanaan, sarana prasarana dan infrastruktur transportasi, serta penetapan rute pelayanan kegiatan subsidi.

4 Kekurangan penerimaan PNBP atas biaya penggunaan prasarana perkeretaapian atau *track access charge* (TAC) pada Ditjen Perkeretaapian.

6 Perhitungan realisasi pemakaian belanja bahan bakar minyak (BBM) pada sembilan satker di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak sesuai ketentuan.

Sumber: AKN I



# Mengawal Konektivitas di Daerah

Metode uji laboratorium yang dilakukan BPK ditiru pemerintah daerah saat akan melakukan serah terima proyek pengerjaan infrastruktur jalan.



**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak hanya mengawal proses pembangunan infrastruktur konektivitas yang dilakukan pemerintah pusat. Pembangunan konektivitas oleh pemerintah daerah pun tak luput dari pemeriksaan BPK.

Pemeriksaan pembangunan konektivitas di daerah salah satunya dilakukan di Provinsi Banten. Kepala BPK Perwakilan Banten Agus Khotib mengatakan, hampir setiap tahun ada pemeriksaan terkait infrastruktur. Hal ini karena daerah-daerah di Banten memang sedang gencar membangun konektivitas, utamanya pembangunan jalan.

Agus menjelaskan, kondisi infrastruktur di Banten belum merata. Infrastruktur di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, relatif lebih baik. Begitu pula dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, kondisi yang berbeda terlihat di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. "Ini agak tertinggal (infrastrukturnya-red)," kata Agus saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa*, pertengahan Februari 2020.

Saat ini, kata Agus, Pemprov Banten memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan dengan tujuan membuka akses wilayah di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. "Mereka besar-besaran membangun jalan," katanya.

Salah satu jalan yang dibangun di Kabupaten Lebak adalah Jalan Cipanas-Warung Banten, yang merupakan salah satu jalan di jalur tengah yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Provinsi Banten.

Ruas jalan ini menjadi penghubung Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Selain itu, Jalan Cipanas-Warung Banten juga dijadikan sebagai akses menuju kawasan wisata Negeri di Atas Awan.

Destinasi wisata itu sempat viral di media sosial dan ramai dikunjungi



■ Agus Khotib



Metode pemeriksaan yang diterapkan BPK tersebut ditiru oleh pemerintah daerah di Banten, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.

masyarakat setempat. Dinamakan Negeri di Atas Awan karena wisatawan bisa melihat pemandangan gulungan awan yang melewati Gunung Luhur seperti sedang berada di atas awan. Destinasi wisata itu berada di Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.

"(Destinasi wisata) Itu dibangun di tebing, pinggirnya jurang. Sekarang agak *critical* karena rawan longsor. Makanya dianjurkan tidak ke sana," katanya.

### Metode pemeriksaan

Agus mengungkapkan, temuan pemeriksaan terkait pembangunan jalan di Provinsi Banten kebanyakan berupa kekurangan volume. Spesifikasinya tidak sesuai dengan yang direncanakan. "Biasanya masalahnya soal ketebalan jalan dan kekurangan volume," kata Agus.

Dalam proses pemeriksaan, BPK mengambil sampel jalan untuk diuji di laboratorium. Biasanya, kata dia, BPK membawa sampel jalan ke laboratorium Universitas Indonesia. Namun, belakangan ini BPK menjajal laboratorium milik Puslitbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Agus mengungkapkan, metode pemeriksaan yang diterapkan BPK tersebut ditiru oleh pemerintah daerah di Banten, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. "Sekarang, mereka sebelum ada acara serah terima barang, melakukan uji laboratorium. Sebelumnya tidak dilakukan," ucap Agus.

Terkait pengambilan sampel, BPK Banten memakai metode akar pangkat 3. Kata Agus, metode ini juga dipakai oleh entitas di daerah.

Menurut dia, entitas di Provinsi Banten sangat terbuka dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK. "Entitas juga cukup responsif melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan." ●

# BPK Ungkap Penyebab Ketidakharmonisan di TVRI

Penambahan wewenang dewan pengawas berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan kerja.



■ Penyerahan LHP Kinerja efektivitas penerapan regulasi LPP TVRI dan LPP RRI dari BPK kepada DPR.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas penerapan regulasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (26/2). Pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai apakah penerapan regu-

lasi terkait tugas dan fungsi organisasi, kepegawaian, serta pelaksanaan anggaran telah diterapkan secara efektif. Pemeriksaan dilaksanakan melalui tahap pemeriksaan pendahuluan sejak tanggal 4 September hingga 15 Oktober 2019 dan pemeriksaan terinci sejak tanggal 21 Oktober hingga 4 Desember 2019. Anggota III selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi mengungkapkan se-

jumlah temuan signifikan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Temuan pertama adalah tentang ketidakharmonisan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di mana undang-undang yang memayungi TVRI dan RRI PP Nomor 13/2005 dan nomor 12/2005 dan juga peraturan yang dibuat oleh dewan pengawas,” kata Achsanul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Permasalahan dalam beleid tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 7 huruf d yang berbunyi, "Dewan Pengawas mempunyai tugas mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi". Syarat pemberhentian sesuai Pasal 24 ayat 4 yakni tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, terlibat merugikan lembaga, dipidana dengan keputusan hukum tetap, dan tidak memenuhi syarat sebagai dewan direksi. Namun dalam praktiknya, dewan pengawas (Dewas) menambahkan syarat pemberhentian dewan direksi melalui hasil penilaian kinerja tidak memuaskan atau tidak lulus.

Berdasarkan pemeriksaan, penilaian kinerja kepada dewan direksi cenderung subjektif. Terhadap indikator-indikator yang pencapaian kinerjanya 100 persen, Dewas menilai bervariasi dan tanpa rumusan yang jelas. Selain itu, Dewas LPP TVRI menambahkan 10 indikator penilaian yang tidak tercantum dalam kontrak manajemen.

Kemudian, berdasarkan pasal 18 ayat 1 dinyatakan dewan pengawas adalah jabatan noneselon. Jabatan ini tidak diatur dalam regulasi lain selain PP 13/2005 dan PP 12/2005. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Pengawas LPP TVRI menafsirkan sendiri jabatan noneselon adalah pejabat negara setingkat menteri, ketua/anggota KPK dan BPK. Dalam praktiknya selain mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 5 juta per bulan sesuai Perpres Nomor 73/2008 dan Perpres Nomor 101/2017, Dewas menggunakan kendaraan dinas setara eselon I dan tiket penerbangan kelas bisnis.

"Noneselon itu di dalam ketatanegaraan kita cuma ada pejabat negara, pejabat struktural, dan ada pejabat fungsional. Jadi kalau noneselon, itu ada hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban yang tidak sesuai selama ini dinikmati oleh dewan pengawas," ujarnya.

Kemudian, dalam pasal 42 disebutkan, "Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TVRI dan RRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab

di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam praktiknya, LPP TVRI dan LPP RRI tidak memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara mandiri.

Meskipun sebagai institusi pemerintah yang mandiri, namun PPK LPP TVRI dan LPP RRI adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Hal ini mengakibatkan LPP TVRI dan LPP RRI tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan PNS secara mandiri untuk mengantisipasi semakin banyaknya PNS memasuki usia pensiun.

BPK juga menemukan ketentuan dalam Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 2 Tahun 2018 tidak sesuai dengan PP 13/2005. Dalam keputusan tersebut, Dewas LPP TVRI menambahkan ketentuan yang tidak diatur dalam PP 13/2005 antara lain mengangkat tenaga ahli dan/atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas. Sementara, dalam PP 13/2005 dinyatakan Dewas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Dewas juga menambahkan ketentuan mengajukan pertanyaan, mengakses data dan informasi, pemantauan tempat kerja, serta sarana dan prasarana. Hal ini dinilai dapat menimbulkan tumpang tindih dengan tugas pengawasan yang menjadi tugas Satuan Pengawasan Intern.

Selain itu, Dewas juga membuat ketentuan menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Dewan Direksi. Sementara, hal itu tidak diatur dalam PP 13/2005. Penghasilan Dewan Direksi LPP TVRI ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor 566/MK.02/2017. Penambahan wewenang Dewas tersebut menjadikan kegiatan operasional terganggu dan menjadi lambat serta berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan kerja antara Dewas dan Dewan Direksi LPP TVRI.

Berdasarkan sejumlah permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan

beberapa hal. BPK menyarankan agar dewan direksi serta dewas LPP TVRI dan LPP RRI berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenkumham untuk menginisiasi revisi dua peraturan pemerintah tersebut. "Pemerintah segera memperbaiki peraturan pemerintah dan kami juga meminta agar mencabut keputusan dewan pengawas TVRI yang tidak sesuai dengan aturan yang ada," ucap Achsanul.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Dewan Pengawas LPP TVRI dan LPP RRI dalam melakukan penilaian kinerja Dewan Direksi LPP TVRI dan LPP RRI mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan indikator kinerja yang terukur. Dewas LPP TVRI dan LPP RRI disarankan dalam melakukan tugas dan fungsinya berpedoman kepada UU Nomor 32 Tahun 2002, PP Nomor 12 Tahun 2005, PP Nomor 13 Tahun 2005, Perpres Nomor 73 Tahun 2008, dan Perpres Nomor 101 Tahun 2017 tanpa menafsirkan sendiri jabatan noneselon yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian BPK merekomendasikan agar ketua Dewas LPP TVRI mencabut keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kerja dan Hubungan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI. BPK juga memberi rekomendasi agar dewan direksi serta dewas LPP TVRI dan LPP RRI menyusun dan menetapkan tata hubungan kerja antara dewan pengawas dan dewan direksi yang diatur dalam suatu pedoman tata hubungan kerja yang disepakati bersama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"BPK menyimpulkan, apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi oleh LPP RRI dan LPP TVRI maka dapat mempengaruhi efektivitas penerapan regulasi terkait tugas dan fungsi organisasi, kepegawaian, dan pelaksanaan anggaran," ujarnya. ●





# Proses Pemeriksaan Infrastruktur

Pemeriksaan infrastruktur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara umum terbagi atas dua tahap. Yaitu tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

**T**ahap perencanaan dimulai dari pemilihan sampel pemeriksaan dengan pendekatan audit yang berbasis risiko (*Risk Based Audit Approach*). Dengan pendekatan ini, pelaksanaan pemeriksaan akan dilakukan pengujian secara mendalam terhadap paket-paket pekerjaan infrastruktur yang memiliki nilai material secara kontrak, *complicated* dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan, maupun lokasi pada daerah *remote area*.

Perencanaan juga akan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan analisis dokumen dan pemeriksaan fisik, serta informasi-informasi awal yang dapat dikumpulkan dari media massa atau pengaduan. Koordinasi juga dilakukan dengan tenaga ahli independen terkait pelaksanaan pemeriksaan yang membutuhkan kualifikasi teknis tertentu khususnya jika dalam pemeriksaan diperlukan pengujian atas kualitas hasil pekerjaan.

Pemeriksa akan mengumpulkan beberapa dokumen yang dibutuhkan sebagai bahan awal pemeriksaan dari entitas yang diperiksa antara lain dokumen perencanaan pekerjaan, seperti gambar desain perencanaan awal, KAK pelaksanaan pekerjaan, *bill of quantity* (BoQ), serta harga perkiraan sendiri (HPS).

Selain itu, dilakukan pengumpulan dokumen pelaksanaan pekerjaan meliputi antara lain dokumen kontrak yang memuat syarat umum serta syarat khusus dan spesifikasi teknis kontrak. Persiapan selanjutnya yakni berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak entitas yang diperiksa terkait rencana diskusi awal dan pelaksanaan pemeriksaan fisik lapangan atas sampel pemeriksaan.

Setelah melalui tahap perencanaan, prosesnya berlanjut ke tahap pelaksanaan. Di tahap ini, pemeriksa melakukan analisis dokumen perencanaan teknis yang menjadi dasar penyusunan *bill of quantity* (BoQ) dan HPS untuk menguji kesesuaian perhitungan kuantitas dan harga dalam uraian pekerjaan dengan desain perencanaan.

Analisis juga dilakukan terhadap perubahan-perubahan volume pekerjaan atau pengurangan/penambahan pekerjaan baru yang dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan. Hal itu untuk menguji perubahan volume dan pengurangan/penambahan item pekerjaan baru yang dilakukan memang diperlukan berdasarkan justifikasi teknis.

Pemeriksa kemudian menganalisis kesesuaian uraian pekerjaan dalam kontrak dengan syarat umum, syarat khusus, dan spesifikasi teknis kontrak yang mengatur tata cara pelaksanaan serta cara pengukuran dan pembayaran kepada penyedia jasa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik lapangan untuk melakukan pengujian kesesuaian metode pelaksanaan pekerjaan, volume, dan spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak yang diperiksa dengan membandingkannya terhadap kontrak atau dokumen pelaksanaan pekerjaan lainnya yang menjadi acuan pekerjaan tersebut.

Pemeriksaan fisik melibatkan tenaga ahli independen terkait pelaksanaan pemeriksaan yang membutuhkan kualifikasi teknis tertentu, khususnya jika dalam pemeriksaan diperlukan pengujian atas kualitas hasil pekerjaan.

Salah satu hal yang disoroti dalam pemeriksaan infrastruktur adalah ketidakefektifan. Ketidakefektifan adalah kondisi di mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tidak tercapai sasaran yang telah ditetapkan dalam ta-



**Pemeriksaan fisik melibatkan tenaga ahli independen terkait pelaksanaan pemeriksaan yang membutuhkan kualifikasi teknis tertentu.**

hapan perencanaan pembangunan infrastruktur setelah pembangunan fisik infrastruktur tersebut dilaksanakan.

Dalam pembangunan fasilitas puskesmas, misalnya, ketidakefektifan terjadi apabila pembangunan yang awalnya bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi karena lokasi pembangunan tidak berada pada lokasi strategis yang memudahkan untuk dijangkau, maka masyarakat tidak akan secara optimal memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.

Temuan lain yang berpotensi terjadi dalam pemeriksaan infrastruktur yakni kemahalan harga barang. Hal itu adalah tambahan biaya yang secara sengaja atau tidak sengaja dianggarkan atau dibiayakan oleh pihak-pihak terkait dalam harga pekerjaan atau harga kontrak yang mengakibatkan nilai pekerjaan tersebut lebih tinggi daripada seharusnya.

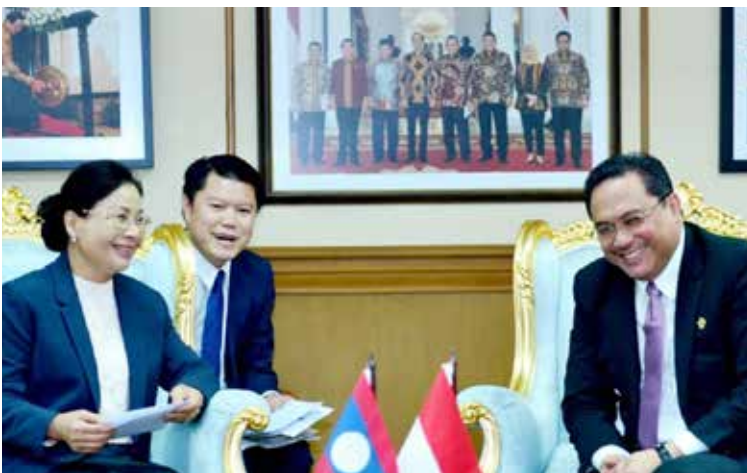
Dalam pelaksanaan pemeriksaan infrastruktur, kemahalan harga pekerjaan dapat terjadi saat pelaksanaan perencanaan maupun saat pelaksanaan pekerjaan. Kemahalan harga saat perencanaan antara lain dapat terjadi karena saat penyusunan harga perkiraan sendiri, survei untuk memperoleh harga pembanding atas suatu barang tidak dilakukan secara langsung kepada produsen tetapi melalui perantara.

Selain itu, kekurangan volume juga bisa menjadi temuan. Kekurangan volume dalam pemeriksaan infrastruktur adalah ketidaksesuaian jumlah satuan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan dengan jumlah satuan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak terkait.

Kesimpulan bahwa suatu pekerjaan dinyatakan kekurangan volume dilakukan setelah pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik dan analisis perhitungan kembali atas pelaksanaan pekerjaan yang senyatanya dilaksanakan oleh pihak terkait.

● **Sumber:** Padang Pamungkas, Kepala Auditorat IV A

# BPK Bantu SAO Lao Kembangkan Kualitas Pemeriksaan



■ Pertemuan Ketua BPK RI dan Presiden SAO Lao.

BPK dipercaya melaksanakan pelatihan untuk ketua tim pemeriksa dari SAO Lao.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan The State Audit Organization of Lao People's Democratic Republic (SAO Lao). Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, pihaknya terbuka untuk terus berkolaborasi dan meningkatkan kapasitas organisasi serta pemeriksaan.

Hal itu disampaikan Agung ketika menerima kunjungan tingkat tinggi Presiden The State Audit Organization of Lao People's Democratic Republic Viengthong Siphandone yang didampingi oleh Duta Besar Laos untuk Indonesia Phomma Sidsena serta delegasi lainnya di Kantor Pusat BPK pada 10 Februari 2020.

Dalam rangkaian kegiatan kunjungan dilaksanakan dua kegiatan besar yaitu *executive discussion* dengan topik *Grading Scheme for BPK Auditors* dan pembukaan pelatihan untuk ketua tim pemeriksa SAO Lao. Menurut Agung, merupakan kehormatan

Functional Position		
Level	Auditor	Assesor
Senior	13	14
Mid-level	11	12
Junior	9	10
Newly-appointed	8	

■ Wakil Ketua BPK RI dalam diskusi eksekutif.

bagi BPK dipercaya melaksanakan pelatihan untuk ketua tim pemeriksa dari SAO Lao.

Sementara itu, Presiden SAO Lao dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada BPK yang selama ini telah membantu SAO Lao dalam pengembangan kapasitas organisasi dan pemeriksaan. Presiden SAO Lao juga menyampaikan keinginannya untuk terus melanjutkan kerja sama yang telah berjalan dengan baik selama ini.

Dalam diskusi eksekutif, paparan disampaikan oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif. Dalam paparannya, Agus menjelaskan mengenai latar belakang, proses penyusunan *grading auditor*, dampak, manfaat, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan skema tersebut. Paparan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi delegasi SAO Lao yang sedang dalam proses mengembangkan skema *grading* untuk para pemeriksa di SAO Lao.

Sementara itu, pelatihan untuk para ketua tim SAO Lao merupakan pelaksanaan rencana aksi kerja sama bilateral kedua institusi yang ditandatangani pada 2019. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari di Badan Diklat BPK, Kalibata, Jakarta. Tujuan kegiatan itu untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para ketua tim SAO Lao baik dalam hal memimpin tim pemeriksa, maupun terkait metodologi pemeriksaan. ●



# Auditor BPK Berbagi Ilmu di Pelatihan INTOSAI WGEI

Pelatihan itu bertujuan meningkatkan pemahaman mengidentifikasi risiko dan memilih topik pemeriksaan di area PSA.



Sebagai bentuk komitmen internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mendorong *knowledge sharing* dan kerja sama pemeriksaan di bidang industri ekstraktif, BPK mengirimkan dua orang pemeriksa sebagai pengajar untuk INTOSAI Working Group on Extractive Industries (WGEI) 1st International Training on Understanding Production Sharing Agreements (PSA). Kegiatan itu digelar di Pretoria, Afrika Selatan pada 3–7 Februari 2020.

Dua pengajar dari BPK RI yakni Paulina Klara Fransiska Sinaga dan Rino Widhy Leksono. Kedua pemeriksa tersebut bergabung dengan tim pengajar lain yang berasal dari Norwegia dan Uganda.



## DARI ATAS KE BAWAH

Paulina Klara Fransiska saat menjadi *trainer*.

Rino saat menjadi *trainer*.

Rino Widhy Leksono saat menceritakan pengalamannya kepada *Warta Pemeriksa*.







Rino mengatakan, sepekan sebelum kegiatan pelatihan dilakukan, tim pengajar sudah berkumpul untuk menentukan bahan ajar. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari 11 negara.

Rino mengatakan, pelatihan itu bertujuan meningkatkan pemahaman tentang mengidentifikasi risiko dan memilih topik pemeriksaan di area PSA. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara INTOSAI WGEI dengan African Organisation of Supreme Audit Institutions-English (AFROSAI-E).

BPK dipercaya menjadi pengajar karena pengalaman BPK dalam pemeriksaan di sektor industri ekstraktif, terutama sektor minyak dan gas. Pemerintah Indonesia merupakan pionir dalam menerapkan model PSA untuk kerja sama pengelolaan migas dengan swasta.

"Kebetulan negara peserta itu mayoritas baru pertama kali menerapkan itu (model PSA). Jadi mereka belajar," kata Rino kepada *Warta Pemeriksa*.

Beberapa hal yang diajarkan tim pengajar BPK yakni pembahasan isu-isu mengenai kontrak, pajak, royalti dan bonus, serta perhitungan bagi hasil. Tim pengajar BPK juga membagikan sejarah

pengelolaan migas di Indonesia serta metode pemeriksaan BPK. "Kita juga *share* temuan pemeriksaan sebagai bahan pengajaran," kata Rino.

Selain itu, Rino mengaku juga bisa mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan tersebut. Dia mencontohkan, Norwegia adalah negara yang hanya melakukan kegiatan di hulu migas. "Jadi mereka tidak ada skema bagi hasil, murni diekspor semua keluar," kata Rino.

Sementara, dengan pengajar dari Uganda, Rino mengaku justru lebih banyak membagikan pengalaman BPK dalam pemeriksaan migas. Dia menjelaskan, Uganda saat ini masih dalam tahap eksplorasi dan belum mulai berproduksi. "Mereka banyak belajar dari kita," kata Rino.

Selain itu, dari 11 negara peserta pelatihan hanya Oman negara yang sudah melakukan produksi migas.

Sementara negara peserta lainnya baru belajar melakukan pemeriksaan.

Forum ini juga merupakan wujud eksternalisasi pengalaman BPK di komunitas internasional. Rino berharap BPK bisa terus aktif dalam kegiatan serupa. "Kalau menurut saya, karena kita ingin menjadi *leading* SAI khususnya di WGEI jadi ya harus terus aktif," kata Rino. ●

Paulina Klara Fransiska dan Rino Widhy Leksono bersama peserta WGEI-Afrosai Training.

”

**Kebetulan negara peserta itu mayoritas baru pertama kali menerapkan itu (model PSA). Jadi mereka belajar.**

## HENDRA SUSANTO

ANGGOTA I/PIMPINAN PEMERIKSAAN  
KEUANGAN NEGARA I BPK

# Mengubah Keterbatasan Menjadi Terobosan



**D**ari sekian banyak pengalaman selama 20 tahun mengabdikan diri di Badan Pemeriksa Keuangan, ada satu pengalaman pemeriksaan yang paling berkesan bagi Hendra Susanto yang kini menjabat Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK. Pengalaman paling berkesan itu adalah saat ia melakukan pemeriksaan investigasi dan penghitungan kerugian negara atas pembangunan dermaga Sabang di Aceh. Pemeriksaan itu pula yang membuat pria kelahiran Lahat, Sumatera Selatan, 14 September 1972 itu meyakini bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dilakukan apabila ada tekad kuat dalam diri seseorang. Bahkan, pemeriksaan yang awalnya disertai keterbatasan itu, ia bisa menghasilkan terobosan. Berikut petikan wawancara Hendra dengan *Warta Pemeriksa*.

### **Bagaimana kisah awal Bapak bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan?**

Dulu saya tidak kenal BPK. 20 tahun lalu, ketika saya baru selesai kuliah dan mendaftarkan diri di BPK sebagai pemeriksa, saya tidak mengerti BPK itu apa. Saya daftar saja dan alhamdulillah saya lulus. Setelah saya masuk, saya pikir BPK itu adalah suatu lembaga yang sangat misterius. Karena pada 1999 sampai 2000 itu BPK tidak banyak terekspos. Memang ketika saya masuk, BPK sangat misterius. Tapi, itu jauh berbeda dengan sekarang. Itu yang menjadi kebanggaan bagi saya. Kalau di dunia luar itu ada digitalisasi, nah kita sudah merapat ke sana. Kita sudah mengikuti era itu.

### Bagaimana Bapak melihat BPK saat ini?

Bagi saya, BPK sebenarnya saat ini sudah sangat bagus. Citra internasional BPK juga sudah sangat bagus. Dari sisi domestik juga bagus. Ada rasa bangga saya terhadap BPK. Saya sudah 20 tahun di BPK dan kebanggaan itu sudah semakin kental di dalam diri saya.

### Pengalaman apa yang paling berkesan selama Bapak bekerja di BPK?

Sebenarnya semua tugas pemeriksaan yang dipercayakan kepada saya tidak ada yang tidak berkesan. Karena masing-masing tugas pemeriksaan memiliki tantangan dan keunikan tersendiri.

Namun, dari semua itu ada yang paling berkesan, yaitu pemeriksaan investigasi dan penghitungan kerugian negara atas pembangunan dermaga Sabang di Aceh. Kenapa berkesan? Karena kasusnya sangat rumit dan *complicated*, melibatkan banyak pihak, *multy years construction, abuse of power from the top to the staff level*, nilai konstruksi yang cukup besar hampir Rp1 triliun dan nilai kerugian negaranya sekitar Rp300 miliar.

### Lalu, apa yang membuat pengalaman pemeriksaan investigasi itu menjadi yang paling berkesan?

Ini adalah kasus pertama saya yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, anggota tim yang diberikan kepada saya selaku ketua tim juga baru pertama kali memeriksa *mega construction* seperti ini.

Kondisi itu membuat saya harus menyamakan *level of knowledge* semua anggota tim dalam waktu singkat. Alhamdulillah, semua tantangan itu dapat kita selesaikan dengan baik. Bahkan kita bisa membuat suatu rumusan baru dalam metode penghitungan kerugian negara yang kita sebut dengan "Metode Penghitungan Real Cost" dengan empat layer kerugian negara.

Metode itu baru pertama kali diterapkan dalam LHP PKN (Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara) BPK. Sampai pada akhirnya saya memberikan keterangan ahli di pengadilan. Dengan metode PKN ini, hakim dapat menerima dengan keyakinan yang kuat terhadap hasil PKN BPK. Kuncinya adalah dengan bekerja cerdas dan ikhlas. Dengan dua hal itu, insya Allah semua keter-

batasan dan ketidakmungkinan akan dapat dilalui dengan baik. *Just do it because impossible is nothing.*

### Sebagai Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, hal apa saja yang akan Bapak lakukan?

Mencoba memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki BPK guna membantu mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan para pegawai pelaksana BPK baik itu pemeriksa maupun penunjang pendukung.

### Apa harapan Bapak terhadap BPK?

Kita bisa mandiri dari sisi anggaran, rekrutmen, dan pola karier sumber daya manusia (SDM). Dengan kemandirian tersebut, kita bisa segera memodernisasi sistem dan tata kelola pemeriksaan yang baik, sehingga profesionalisme kita meningkat. *At the end of the day*, kepercayaan publik dapat kita raih. Sehingga pemeriksaan sebagai sebuah kebutuhan dapat terwujud.

### Pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas. Apakah AKN I sudah melakukan pemeriksaan terkait konektivitas?

Secara langsung AKN I telah melaksanakan pemeriksaan terkait konektivitas. Melalui pemeriksaan pada Kementerian Perhubungan, AKN I turut bersumbangsih dalam memeriksa akuntabilitas dan keuangan negara pada kepelabuhanan, kebandarudaraan, maupun perkeretaapian. Pemeriksaan yang telah dilakukan di antaranya konektivitas tol laut dan infrastruktur transportasi darat, udara, dan perkeretaapian.

Sesuai RPJMN 2020-2024, pemerintah sudah menegaskan konektivitas sebagai salah satu prioritas. Di dalamnya Kementerian Perhubungan turut serta sebagai pelaksana dalam beberapa proyek prioritas strategis, misalnya Kereta Api kecepatan tinggi di Pulau Jawa, jaringan pelabuhan utama terpadu, sistem angkutan umum massal perkotaan, serta jembatan udara 37 rute di Papua.

Pemeriksaan yang dilakukan AKN I ke depannya menitikberatkan pada proyek prioritas strategis tersebut. Namun demikian, perlu juga disusun salah satu tematik pemeriksaan terkait konektivitas yang melibatkan seluruh auditorat dengan masing-masing portofolio. ●



Kuncinya adalah dengan bekerja cerdas dan ikhlas. Dengan dua hal itu, insya Allah semua keterbatasan dan ketidakmungkinan akan dapat dilalui dengan baik. *Just do it because impossible is nothing.*

BUDI KARYA SUMADI, MENTERI PERHUBUNGAN

# Pemeriksaan BPK Bantu Cegah Kecurangan

**P**embangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas jadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Kementerian Perhubungan pun kembali mendapat pekerjaan untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

Salah satu yang menjadi fokus pembangunan konektivitas tahun ini adalah pengembangan infrastruktur di kawasan pariwisata superprioritas atau dikenal juga dengan istilah "Lima Bali Baru".

Kepada *Warta Pemeriksa*, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan rencana pembangunan konektivitas dan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawal pembangunan konektivitas. Berikut petikan wawancaranya.

## **Pemerintah saat ini sedang gencar membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas. Bagaimana kondisi konektivitas Indonesia saat ini?**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau yang merentang 5.000 kilometer dari timur ke barat. Ini menjadi salah satu tantangan dalam mengurangi disparitas regional. Saat ini Kementerian Perhubungan sedang membangun dan mengembangkan infrastruktur serta mempunyai program pemerintah untuk meningkatkan konektivitas. Pembangunan bandara dan pelabuhan baru dilakukan di beberapa daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Pemerintah juga mempunyai program tol laut untuk menyalurkan logistik secara merata dengan tujuan menekan disparitas harga di beberapa daerah di Indonesia.

## **Apa saja infrastruktur yang akan dibangun ke depan?**

Sebagaimana arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) pada Kabinet Indonesia Maju, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan dengan konsentrasi menciptakan konektivitas di kawasan pariwisata, in-

dustri, dan logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP) dan pengembangan angkutan massal perkotaan.

Untuk periode tahun anggaran 2020, Kemenhub akan fokus melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas guna mendukung sektor pariwisata di kawasan pariwisata superprioritas atau lima Bali Baru Indonesia yaitu Borobudur, Mandailing, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Likupang dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,95 triliun.

Di sektor perhubungan darat di antaranya pengadaan mini bus sekolah sebanyak 260 unit, pembangunan terminal tipe A lanjutan di empat lokasi, pembangunan terminal barang internasional di tujuh lokasi, rehabilitasi/peningkatan terminal tipe A di 20 lokasi, rehabilitasi UPPKB pada lima lokasi, perlengkapan jalan sebanyak 254 paket, subsidi angkutan jalan untuk 307 trayek, subsidi perkotaan melalui skema pembelian layanan (*Buy The Service*), pembangunan pelabuhan sungai baru pada tiga lokasi, pembangunan kapal penyeberangan baru enam unit, pembangunan kapal lanjutan empat unit, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan



”

Infrastruktur merupakan satu elemen penting karena dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.



dephub.go.id

di 13 lokasi, pembangunan pelabuhan danau lanjutan pada 10 lokasi, serta subsidi angkutan penyeberangan (228 lintas dan penyeberangan *Long Distance Ferry*).

Di sektor perkeretaapian, akan ada pembangunan jalan kereta api sepanjang 238,80 km/sp, peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 229,48 km/sp, dan pembangunan bangunan khusus sebanyak 1 unit.

Kemudian, di sektor transportasi laut akan ada pelayanan angkutan kapal ternak sebanyak enam trayek, angkutan laut perintis 113 trayek, angkutan barang tol laut sebanyak 21 trayek, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pengadaan di bidang telekomunikasi pelayaran 28 paket, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pengadaan di bidang/pengadaan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) 155 paket, pembangunan kapal patroli 15 unit, serta pembangunan/pengembangan/rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut.

**BPK telah melakukan sejumlah pemeriksaan terkait program pembangunan konektivitas. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pemeriksaan BPK tersebut?**

BPK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik atas proyek yang sedang dijalankan pemerintah. Hal tersebut pastinya sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju.

Sehingga, kami merasa dengan adanya pemeriksaan BPK terhadap peningkatan konektivitas merupakan hal yang positif karena dapat membantu pemerintah mengawasi proyek-proyek yang sedang dijalankan. Sehingga, pekerjaan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu dan meminimalkan oknum-oknum yang ingin melakukan kecurangan. Peningkatan konektivitas merupakan visi misi dari Presiden Joko Widodo untuk terciptanya Indonesia maju.

Selain itu, infrastruktur merupakan satu elemen penting karena dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan konektivitas yang telah terjalin dapat menjadikan masyarakat mudah melakukan perjalanan wisata baik untuk wisatawan lokal maupun asing.

### Apa harapan Bapak dari pemeriksaan BPK?

Harapan kami dengan adanya pemeriksaan ini pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat selesai tepat waktu karena tidak ada oknum yang berani melakukan kecurangan. Selain itu, kami berharap BPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dalam melakukan pemeriksaan tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan juga amanah.

### Kembali ke soal program, apa saja hal-hal yang disoroti atau jadi prioritas dalam peningkatan konektivitas di Indonesia?

Untuk satu tahun ke depan ini seperti arahan Presiden, beliau menginginkan pada 2020 kelima destinasi wisata superprioritas sudah bisa dipromosikan. Untuk itu fokus kami yaitu melakukan pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung sektor pariwisata tersebut. Bukan hanya fokus pembangunannya saja tetapi memastikan pembangunannya *delivered* atau bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat serta mendukung aksesibilitas.

Selain itu, kami juga akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP). Kemenhub juga akan melakukan penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law* di sektor transportasi untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia.

### Berapa anggaran yang disiapkan untuk peningkatan konektivitas?

Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 sebesar Rp43,11 triliun. Total jumlah anggaran ini didapatkan setelah Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi untuk pengembangan destinasi wisata prioritas. Dengan anggaran Kemenhub 2020 tersebut, akan digunakan untuk empat jenis belanja yaitu belanja modal sebesar Rp22,49 triliun atau 52,16 persen dari total anggaran, belanja pegawai sebesar Rp4,05 triliun dengan porsi 9,4 persen, belanja barang mengikat Rp2,98 triliun atau 6,9 persen, dan belanja barang tidak mengikat sebesar Rp13,59 triliun atau 31,54 persen.

Sumber pendanaan dari total anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu rupiah murni sebesar Rp28,62 triliun atau 66,4 persen dari total anggaran, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp6,91 triliun (16 persen), BLU sebesar Rp1,73 triliun (4 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,9 triliun (6,7 persen), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp2,94 triliun (6,8 persen).

### Lalu, berapa anggaran yang disiapkan untuk meningkatkan konektivitas di destinasi pariwisata superprioritas?

Untuk meningkatkan konektivitas di kawasan destinasi pariwisata superprioritas, Kemenhub menyiapkan anggaran sebesar Rp2,95 triliun. Untuk di Danau Toba akan dilakukan pembangunan/rehabilitasi pelabuhan danau di 12 lokasi, melanjutkan pembangunan kapal penyeberangan Ro-Ro sebanyak dua unit dan bus air sebanyak dua unit, subsidi operasional angkutan antar-moda, fasilitas integrasi angkutan jalan, peningkatan jalur kereta api lintas Araskabu-Tebing Tinggi-Siantar sepanjang 35 km'p, dan pembuatan *runway strip* tahap I Bandara Sibisa.

Sedangkan untuk Borobudur akan dibangun pembangunan jalur KA Solo Balapan Bandara Adi Soemarmo, pembangunan KA Bandara Yogyakarta Internasional Airport-Kulonprogo, elektrifikasi jalur KA lintas Yogyakarta-Solo, subsidi operasional angkutan antarmoda, fasilitas integrasi angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan dan DED pembangunan jembatan, sistem persinyalan, dan telekomunikasi serta bangunan stasiun.



**Kami juga akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP).**

Untuk pembangunan di Likupang, peningkatan fasilitas pelabuhan Likupang, pengadaan kapal *bottom glass* di Bunaken, rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Likupang, dan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Lembeh.

Sedangkan pembangunan di Mandalika meliputi pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, fasilitas integrasi angkutan jalan, biaya subsidi operasional angkutan antarmoda KSPN Mandalika, dan peningkatan fasilitas pelabuhan Pamenang/Pelabuhan Gili Trawangan.

Lalu untuk pembangunan di Labuan Bajo akan dilakukan pekerjaan terminal penumpang, dermaga dan rehabilitasi rigid lapangan penumpukan Pelabuhan Labuan Bajo, penyiapan lahan untuk perpanjangan landas pacu, biaya subsidi operasional angkutan antarmoda, fasilitas integrasi angkutan jalan, dan pengadaan dua unit kapal *bottom glass*. Saat ini juga sedang dilakukan pembangunan pelabuhan khusus kargo agar jalur logistik ke NTT semakin maju. ●



# JURNALISTIK

TEMA

## “Sinergi Pemeriksaan BPK Mengawal Harta Negara”

Tema khusus\*:

- Pemeriksaan BPK untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (17 Sustainable Development Goals);
- Peran Audit dalam mengurangi Korupsi;
- Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- BPK dan Wewenang Penghitungan Kerugian Negara;
- Accountability For All untuk Indonesia yang lebih baik.

\*Background Informasi Tema Khusus: <http://bit.ly/2ZJnmhY>

### Persyaratan Lomba

- Peserta adalah wartawan dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kartu identitas diri;
- Peserta adalah wartawan yang bekerja di media cetak atau media online kantor berita dibuktikan dengan tanda pengenal wartawan yang dilampirkan salinannya saat mengirim karya tulis;
- Hasil karya merupakan karya orisinal yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran, bukan terjemahan, non-SARA, dan tidak tergolong advertorial;
- Karya jurnalistik dimuat di media cetak atau media online periode 1 Oktober 2019 – 30 April 2020;
- Karya bisa berbentuk opini serta bentuk pemberitaan;
- Panitia diberi hak dan wewenang untuk mempublikasikan karya jurnalistik peserta lomba dengan mencantumkan nama penulisnya;
- Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

### Kategori

Pemberitaan  
di Media Cetak atau Media OnlineOpini  
di Media Cetak atau Media Online

### Batas Pengiriman

30 April 2020

### Hadiah Pemenang Lomba

masing-masing kategori

Juara I : Rp10.000.000

Juara II : Rp8.000.000

Juara III : Rp5.000.000

Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

### Pengiriman Karya Lomba

- Karya jurnalistik dikirimkan ke alamat email [publikasimedia@bpk.go.id](mailto:publikasimedia@bpk.go.id) atau [wartabpkri@gmail.com](mailto:wartabpkri@gmail.com) disertai dengan hasil scan KTP; scan Press ID; scan bukti pemuatan opini/berita di media cetak lengkap dengan keterangan edisi, hari, tanggal, halaman; link bukti pemuatan opini/berita di media online; scan lembar pernyataan orisinalitas karya (<http://bit.ly/39o8Xw2>); dengan subject email: **Lomba Karya Jurnalistik BPK 2020**;
- Karya diterima panitia **paling lambat pada 30 April 2020 pukul 15.00 WIB**. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur;
- Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karya untuk masing-masing kategori.



# BELAJAR HAL BARU di Kilang Minyak

Pemeriksaan tetap harus dilakukan meskipun ada potensi terkena radiasi.

**T**idak semua orang, bahkan mereka yang bekerja di sektor perminyakan pernah mengunjungi kilang. Begitu juga auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tak semua pernah melakukan pemeriksaan di *refinery unit* milik Pertamina.

Salah satu staf BPK yang baru saja melakukan kunjungan dan pemeriksaan di sana adalah Afiani Fawaidah. Afiani, yang saat ini menjadi staf Auditorat Utama Keuangan Negara VII, melakukan pemeriksaan di Pertamina Refinery Unit V Balikpapan.

Berada di tempat tak umum, maka tak heran jika banyak pengalaman yang didapatkan usai melakukan pemeriksaan. Mulai dari kemungkinan terkena radiasi alat hingga mengasah otak terkait ilmu baru yang didapat di tempat pemeriksaan. "Saya yang lulusan akuntansi harus baca-baca soal ilmu kimia, teknik,

dan fisika," ujar dia kepada tim *Warta Pemeriksa* di Jakarta, belum lama ini.

Awalnya, kata Afiani yang mulai berseragam putih berlambang BPK sejak 2011 ini, dia ditempatkan di AKN I selama tujuh setengah tahun. Hingga kemudian pada 2018, dia dipindahkan ke AKN VII yang membawahi pemeriksaan terkait dengan BUMN.

Afiani pun kemudian mendapat

”

Masuknya pun menggunakan baju khusus, yang cukup tebal, helm pengaman dan *ear plug*.

penugasan memeriksa kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pertamina. Proses pemeriksaan di kantor pusat ia habiskan selama 12 hari untuk memeriksa kinerja perusahaan. Sisanya, dia harus mengunjungi kantor dan kilang di Balikpapan.

Ternyata, ujar dia, masuk ke dalam kilang tak semudah yang terpikirkan. Dia harus mendapatkan izin dan melalui proses *briefing* persiapan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. "Masuknya pun menggunakan baju khusus, yang cukup tebal, helm pengaman dan *ear plug*," ungkap lulusan Universitas Brawijaya ini. *Ear plug*, lanjutnya, ternyata merupakan alat pengaman penting selama bekerja di dalam kilang dan melakukan proses pemeriksaan pembangkit (*power plant*).

Tak menunggu lama, baru hari pertama memeriksa di kilang, dia sudah mendapatkan pengalaman unik. Misalnya saja, dia banyak menemui karyawan pe-





1



2

#### KETERANGAN FOTO

- 1 Kilang Pertamina merupakan Area Objek Vital Nasional yang menjadi salah satu objek pemeriksaan BPK.
- 2 Tim BPK bersiap melakukan pemeriksaan fisik kilang Pertamina Balikpapan.
- 3 Cek Fisik Kilang Pertamina harus menggunakan *jumpsuit*, helm, dan *ear plug* demi alasan keamanan.
- 4 Sehabis menuruni tangga setinggi kurang lebih 30 meter untuk mengecek tangki.



3



4

rempuan di kilang. Walau jumlahnya tak sebanyak laki-laki, akan tetapi mereka juga memiliki peran penting di sana.

Pekerjaan mereka pun tidak dibedakan alias memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Misalnya, melakukan pemeriksaan mesin. Semua harus melakukan tugas ini, walaupun harus masuk ke dalam lorong berukuran sempit dan berkubang oli setelah keluar dari ruangan tersebut. "Selama melakukan pemeriksaan, yang kita bicarakan tak hanya soal pekerjaan. Tetapi juga cerita orang-orang yang ada di dalamnya," ungkap dia.

Para perempuan itu juga mengenakan hijab walau kondisi di dalam sana amat panas. Walau tidak seharian di dalam kilang, tetap saja, hawanya

amat panas, apalagi dengan pakaian tebal. Akan tetapi dia melihat karyawan perempuan di sana tidak mengeluhkan hal tersebut.

Tak hanya itu, dia juga baru mengetahui bahwa kemungkinan ada radiasi yang diterima di tempat pemeriksaan. Sebagai perempuan, dia pun sedikit merasa takut bila harus menerima radiasi selama berada di kilang. "Prosesnya hanya beberapa jam. Jadi tidak ada masalah, walau sebenarnya takut juga," ucap dia.

Selain soal kemungkinan radiasi, kejadian unik lainnya adalah proses komunikasi yang membutuhkan waktu. Mungkin karena lebih banyak di dalam ruangan sempit dan jarang menemui pemeriksa, petugas yang bekerja di kilang jadi terkesan kaku. Umumnya mereka menjelaskan sesuatu secara singkat dan tak banyak hal yang diungkap. Padahal, sebagai pemeriksa, Afiani harus banyak mendapatkan informasi dari *auditee*.

"Umumnya beberapa kali staf di sana merasa tidak boleh menjawab, belum lagi jawaban-jawaban yang singkat. Sehingga butuh obrolan dan penjelasan ekstra, karena tugas kita sebagai pemeriksa," ucap dia.

Belum lagi ketika berada di dalam pembangkit dengan suara bising yang menyebabkan komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat. Kadang dia melakukan tanya jawab

dengan menggunakan media kertas. "Atau pas keluar dari ruangan yang bising, petugas yang mendampingi baru menjawab pertanyaan kami," ujar dia.

#### Belajar ilmu baru

Setiap melakukan pemeriksaan, Afiani mengaku selalu saja ada ilmu baru yang didapat. Misalnya, selama melakukan pemeriksaan di kilang, dia jadi mengetahui sedikit soal kimia dan permesinan.

Apalagi petugas pendamping memang menjelaskan panjang lebar soal mesin. Meskipun tetap saja, begitu keluar dia harus memeriksa kembali informasi yang didapat. Umumnya, proses ini dilakukan dengan mencari tahu lewat mesin pencari Google dan bertanya pada orang yang mengerti hal tersebut. "Saya harus mencari tahu agar bisa mengetahui apa yang dijawab selama ini jujur atau tidak, tepat atau tidak, dan lain-lain," ungkapnya.

Dia juga mengaku belajar sedikit mengenai ilmu fisika. Hal itu perlu karena pemeriksaan tidak bisa dilepaskan dari proses *refinery* di kilang. "Kita tahunya minyak *kan* hanya Peralite atau Pertamax. Ternyata, di sana prosesnya berbagai macam. Mulai dari BBM, kebutuhan industri, seperti plastik sampai kosmetik yang kita pakai. Itu ilmu yang benar-benar sulit didapatkan kalau tidak terlibat langsung di dalamnya," tutur dia. ●

# Mengubah Rumah Jadi *Homestay*

Beragamnya perilaku konsumen menjadi salah satu tantangan menjalani bisnis penginapan.

**M**enjalankan suatu usaha ternyata cukup bermodal nekat dan keberuntungan. Hal inilah yang dirasakan Dewi Sekar Rukmi, pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum. Berkat keberanian dan keberuntungan, ia dapat mengubah rumahnya di Yogyakarta menjadi *homestay* untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah.

Sekar merasa beruntung karena pernah ditugaskan sebagai staf Subbagian SDM, Hukum, dan Hubungan Masyarakat di BPK Perwakilan Yogyakarta sejak 2011 hingga 2014. Saat itu, ia dan suaminya memutuskan membeli sebuah rumah yang beralamat di Tegalmulyo II, Nomor 16 Pakuncen Wirobrajan, Yogyakarta.

Awalnya, ia membeli rumah itu karena lokasinya tak jauh dari kantor BPK Perwakilan DIY. Ia pun sebelumnya tak pernah kepikiran untuk menyewakan rumahnya sebagai *homestay*.

Ide menjadikan rumahnya sebagai *homestay* baru muncul ketika ia dan keluarga harus kembali ke ibu kota dan meninggalkan rumah dua lantai tersebut. "Awalnya suami berpikir untuk dikontrakkan saja. Namun akhirnya kita nekat dijadikan *homestay*," kata Sekar.

Menurut Sekar, ia dan suaminya



## ■ Griya Danastri

terbilang nekat karena tidak mengerti bidang usaha pariwisata. "Walau *enggak* mengerti perhotelan dan kami *enggak* punya latar belakang dagang, kami memberanikan diri menjalankan usaha *homestay*. Suami saya kenal seorang *marketing* hotel yang kemudian menawarkan rumah kami untuk dijadikan *homestay*," ucap dia.

Ia berani mendirikan *homestay* karena beberapa rumah di sekitar tempat tinggalnya dijadikan penginapan. Selain itu, Yogyakarta adalah kota wisata di mana turisnya kadang mencari tempat tinggal untuk menginap alih-alih hotel. "*Homestay* saya amat dekat dengan Malioboro," tutur dia.

Sekar menjalankan bisnis *homestay* yang diberi nama Griya Danastri sejak September 2017. Untuk mempromosikan penginapannya, ia menggandeng tenaga pemasaran hotel. "Jadi bila tamu berasal dari *marketing* kami, ada komisi yang harus dibagi. Namun kalau *enggak*, seutuhnya buat kami," ucap dia.

Griya Danastri memiliki tiga kamar dengan garasi dan *carport* sehingga bisa diisi dua mobil. Tarif penginapannya dibanderol seharga Rp600 ribu per malam untuk serumah (bukan per kamar). Jika sedang *peak season* seperti pada momentum tahun baru atau libur anak sekolah, ia memasang tarif



■ Ruangan di Griya Danastri

hingga Rp900 ribu per malam.

Menurut dia, tarif Rp600 ribu sesuai harga pasar *homestay* di sekitar. "Dulu di dekat *homestay* kami ada yang menawarkan di atas angka itu, sekitar Rp700 ribu, cuma tampaknya mereka kurang laku," ungkap dia.

Layaknya penginapan pada umumnya, Griya Danastri juga menyiapkan handuk, sikat gigi, sabun, dan peralatan rumah tangga seperti kompor, gas, peralatan memasak dan makan. "Saya bersyukur karena meski baru berjalan dua tahun, setiap bulan minimal ada delapan hari yang terisi," katanya.

Angka itu bisa berlipat-lipat bila memasuki libur sekolah dan tahun baru. "Selain itu tidak ada yang rusak di kamar atau ruangan lainnya, artinya tidak ada tamu yang iseng saat bertamu."

Menurut dia, beragamnya perilaku konsumen menjadi salah satu tantangan menjalani bisnis penginapan. Terkadang, kata Sekar, ada tamu yang mencoba berbohong terkait jumlah yang akan menginap. "Misalnya tamu mengatakan yang datang enam orang, ternyata 10 karena yang empat adalah anak-anak. Selain itu ada pula yang mengatakan anak-anak, justru yang datang semuanya bapak-bapak," kata Sekar berseloroh.

"Awalnya tahun ini mau dibuat aturan baru soal tamu dan penambahan *extra bed*, namun ternyata susah juga. Sementara *maintenance* yang pernah jadi kendala di awal sejauh ini tidak ada masalah," tutur dia lagi.



Sampai saat ini, Sekar belum berencana bekerja sama dengan *platform* penginapan seperti Airbnb. Ia mengaku pernah kepikiran soal itu. Namun, ia merasa belum siap jika penginapannya diulas secara luas di dunia maya.

"Namanya tamu kadang subyektif, ada yang bilang bagus banget ada yang bilang *enggak*. Nah, kami rasa kami belum siap akan hal itu," ujar dia.

Bagi Anda yang ingin menginap, jangan segan-segan untuk menghubungi Dewi Sekar Rukmi. Anda bisa menghubungi atau melihat ulasan Griya Danastri di Facebook dengan alamat Dewi Sekar Rukmi atau instagramnya @dsekar.rukmi. ●

”

Saya bersyukur karena meski baru berjalan dua tahun, setiap bulan minimal ada delapan hari yang terisi.





# Kuis



## Pertanyaan:

Di dalam majalah Warta Pemeriksa edisi Desember 2019 Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengungkapkan komitmen Indonesia menominasikan BPK menjadi pemeriksa eksternal IMO. Apakah itu?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email [wartabpkri@gmail.com](mailto:wartabpkri@gmail.com) dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



# Membangun Zona Integritas dengan “Peterpan”

Membangun zona integritas tak hanya bertujuan meraih predikat WBK. Tapi juga menciptakan budaya organisasi yang berintegritas baik di lingkungan perwakilan.

**P**embangunan zona integritas tak hanya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kantor pusat. BPK Perwakilan juga memiliki semangat sama untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pada Desember 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi meraih penghargaan zona integritas sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan dilakukan secara serentak kepada instansi dan kementerian/lembaga lainnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa menceritakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya sejak 2016. Sempat gagal meraih predikat tersebut di tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jabar melakukan sejumlah pembenahan dan meluncurkan beberapa program untuk membangun zona integritas.

“Tujuannya bukan sekadar meraih predikat WBK. Tapi menciptakan budaya organisasi yang berintegritas baik di lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.



■ Arman Syifa saat memperoleh penghargaan WBK



Upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat hingga akhirnya meraih WBK adalah membentuk Tim Zona Integritas (Tim ZI). Tim tersebut bertugas membangun berbagai elemen zona integritas dan mendelegasikan kepada masing-masing pegawai yang ada di lingkungan bagiannya.

Program lainnya bernama "Peterpan" atau Pelayanan Terpadu Perbendaharaan. Arman menjelaskan, "Peterpan" merupakan proses bisnis pada Subbagian Keuangan dalam pelayanan permintaan dan pertanggungjawaban uang muka, uang persediaan, biaya perjalanan dinas pemeriksaan. "Juga mencakup tagihan LS-Bendahara, tagihan LS pihak ketiga, dan tagihan UP yang lebih cepat dan mudah," kata dia.

BPK Perwakilan Jabar juga melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai. Bentuknya bukan hanya paparan, namun juga berbagai contoh nyata melalui agen perubahan yang terdiri atas para pejabat struktural di Perwakilan, serta berbagai media lainnya yang mampu secara repetisi melakukan sosialisasi pembangunan budaya organisasi.

Media tersebut di antaranya adalah LED Anti Gratifikasi, TV internal, dan doa pagi yang diputar setiap mengawali jam kerja. LED Anti Gratifikasi yang dipasang di depan pintu masuk kantor perwakilan secara simultan menegaskan bahwa baik seluruh pegawai maupun tamu yang masuk ke kantor perwakilan telah berada di dalam wilayah yang bebas

dari korupsi, sehingga harus menjaga *muruh* Perwakilan.

"Belajar dari kegagalan di tahun 2017, kami berpikir bisa saja hal tersebut bukan karena kinerja. Akan tetapi dari sikap, cara bicara, komunikasi, dan lain-lain. Kami pun berbenah dan hal tersebut disosialisasikan bukan hanya pada auditor namun siapa saja yang berada di bawah naungan BPK Jabar," ujar dia.

Ada juga sejumlah inovasi unggulan yang telah dibangun dalam upaya pembangunan zona integritas, antara lain kegiatan BPK Jabar Ulin Ka Sakola, Ngopi bareng BPK Jabar, TV/Radio *talk-show*, kunjungan media, dan Cafe Mandiri.

Ia menjelaskan, BPK Jabar Ulin Ka Sakola merupakan program *awareness* mengenai peran, tugas, dan fungsi BPK yang disampaikan kepada para pelajar di wilayah Jawa Barat. Setiap tahunnya, kegiatan ini berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Tujuan lain program ini untuk memotivasi para pelajar agar tertarik dengan profesi-profesi yang ada di BPK sebagai upaya regenerasi.

Adapun program Ngopi bareng BPK Jabar adalah Ngobrol Penuh Informasi bareng BPK Jabar. Ini merupakan kegiatan pembahasan atau *workshop* terkait isu-isu terkini yang berkembang di BPK, khususnya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan target audiens media lokal, LSM, serta seluruh humas dan/atau inspektorat pemerintah daerah di Jabar. Salah satu topik yang pernah diangkat adalah "Penerapan SAP Berbasis Akrual dan Opini BPK". ●



■ Arman Syifa, Inspektoral Utama BPK Ida Sundari, dan Hery Ridwan saat menerima penghargaan WBK.

# Enam Jurusan BPK Jambi Meraih WBK

Keberhasilan BPK Jambi meraih WBK tak lepas dari peran para pimpinan BPK Pusat.

**B**PK Perwakilan Provinsi Jambi menjadi salah satu BPK perwakilan yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2019. Ada beberapa perubahan dan perbaikan yang dilakukan BPK Perwakilan Jambi sehingga disematkan sebagai WBK.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi saat itu, Hery Ridwan (sekarang Kepala Perwakilan BPK Kalbar), mengatakan, ada enam jurusan yang diterapkan untuk membangun zona integritas. Pertama, melaksanakan manajemen perubahan. Caranya dengan membentuk Tim Pembangun WBK, menyusun rencana kerja dan melakukan evaluasi capaian rencana secara berkala, hingga melakukan sosialisasi WBK kepada seluruh pegawai. Selain itu, menetapkan agen perubahan yang berasal dari pegawai struktural maupun fungsional. "Agen perubahan ini

adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya," kata Hery.

Ia menambahkan, para pejabat dan pegawai BPK Perwakilan Jambi secara bersama-sama juga menandatangani Pakta Integritas Komitmen Bersama dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Jurus kedua yang dikeluarkan BPK Perwakilan Jambi adalah melakukan penataan tata laksana dengan memastikan setiap pegawai telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar, prosedur operasi standar (POS), pedoman, dan indikator kinerja yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, perwakilan memanfaatkan teknologi informasi, di antaranya Aplikasi SIMAK, SIPTL, SISDM, SIKAD, SMP, E-Drive, SIAP-LK, dan lainnya.

Hery mengatakan, BPK Jambi juga telah mengembangkan beberapa inovasi berupa aplikasi sederhana untuk memudahkan pelaksanaan tugas layanan. Beberapa aplikasi itu adalah Pokrol Bambu (Pojok Komunikasi dan Kontrol Bagi Pemeriksa Berbasis Hukum) sebagai media konsultasi hukum pada Sub-





■ Hery Ridwan

”

Agen perubahan ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.

bagian Hukum, pengelolaan kertas kerja pemeriksaan (KKP) melalui Aplikasi E-KKP pada Subauditorat, aplikasi dokumen keuangan digital pada Subbagian Keuangan, hingga aplikasi penerimaan tamu pada Subbagian Humas dan TU Kalan.

Berikutnya adalah memastikan kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan oleh perwakilan. “Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas layanan PIK serta kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan masyarakat serta membuat *pooling* atau survei kepuasan atas layanan-layanan tersebut,” kata dia. Inovasi lainnya adalah adanya panduan penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Langkah ketiga membangun zona integritas dilakukan dengan melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM). Hery menjelaskan, hal ini dilakukan dengan menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dengan mengacu kepada analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, menetapkan pola mutasi pegawai di internal perwakilan sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi jabatan dan pengembangan karir pegawai, hingga melakukan pengembangan pegawai melalui pelaksanaan diklat dan *in house training*.

Selain itu, menetapkan target kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi serta melakukan pengukuran secara periodik terhadap target kinerja pegawai. “Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar pemberian *reward* bagi pegawai.”

Keempat, pelaksanaan penguatan akuntabilitas, yaitu adanya peran dan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam memberikan contoh, seperti datang tepat waktu, aktif dalam rapat, penyusunan rencana kinerja, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja di lingkungan perwakilan.

Kelima, perwakilan secara aktif melaksanakan penguatan pengawasan dalam hal pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat, penanganan *whistle blowing system*, dan penanganan benturan kepentingan. “Kami menyediakan kotak pengaduan di halaman kantor perwakilan dan menyediakan fitur pengaduan masyarakat di *website* perwakilan,” katanya.

Jurus keenam, kata dia, adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Caranya dengan menerapkan standar layanan publik, khususnya pada kegiatan layanan tamu dan PIK.

Hery menjelaskan, keberhasilan BPK Jambi meraih WBK tak lepas dari peran para Pimpinan BPK Pusat. “Pimpinan BPK Pusat terutama Anggota V dan Tortama KN V memberikan dukungan, arah kebijakan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK di daerah, baik di bidang pemeriksaan maupun nonpemeriksaan dikaitkan dengan upaya pencapaian predikat WBK oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi,” ucap dia.

Yang tidak kalah penting, kata dia, juga adanya pendampingan serta petunjuk dari Inspektorat Utama BPK selaku Unit Pendorong Zona Integritas di BPK yang terus mendorong dan membimbing perwakilan agar maksimal dalam setiap tahapan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK. ●

Karena AUI dibentuk untuk menangani kasus korupsi, maka harus terbebas dari praktik korupsi.

# Auditorat Utama Investigasi Raih WBK



**A**uditorat Utama Investigasi (AUI) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2019. Penghargaan itu telah diserahkan pada Desember 2019 seiring dengan perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia.

Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman Wara mengatakan, sejak dibentuk pada 2016, AUI sudah mendapatkan mandat dari pimpinan BPK untuk menjadi contoh dalam penegakan integritas dan profesionalisme di BPK. "Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk menjadi WBK, maka AUI menawarkan diri untuk dinilai," kata Nyoman kepada *Warta Pemeriksa*.

Nyoman mengatakan, tim internal di AUI mulai mempersiapkan hal-hal untuk penilaian WBK sejak September 2018. Setelah melewati sejumlah tahap penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN), AUI secara resmi menerima predikat WBK pada 10 Desember 2019.

Terdapat sejumlah hal penting yang diperhatikan untuk mendukung pencapaian WBK. Dia menyebut, faktor terpenting yakni *tone of the top* atau tekad pimpinan untuk mencapai WBK.

"Ini dari atas kemudian diturunkan ke bawah. Sehingga, di bawah melihat ke atas dan mereka yakin bahwa kita bisa menjadi WBK," kata Nyoman.

Selain menyiapkan dokumen-dokumen untuk penilaian, AUI juga harus menunjukkan inovasi yang telah dilakukan dalam pencapaian WBK. Selain itu, melakukan sosialisasi dalam lingkungan internalnya.

"Sehingga, semua komponen AUI paham apa itu WBK, bagaimana cara memperolehnya dan tentu saja bagaimana mempertahankannya di kemudian hari," kata Nyoman.

Nyoman mengatakan, AUI merupakan unit baru di BPK yang

beroperasi secara optimal pada 2017. Menurutnya, AUI memiliki perbedaan dengan unit lain di BPK karena dibentuk dengan prosedur baru dan dilengkapi sumber daya manusia (SDM) yang direkrut melalui seleksi ketat, baik dari sisi integritas maupun profesionalisme kinerja.

AUI adalah unit yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi. Sehingga, menurut Nyoman, AUI harus terbebas dari praktik korupsi.

"Bagaimana mungkin sebuah unit yang dibentuk dalam membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi justru di dalamnya ada korupsi? Di situlah tekad kita untuk membuat AUI menjadi WBK," kata Nyoman.

AUI juga bertugas melayani aparat penegak hukum. Nyoman mengatakan, AUI membantu aparat dalam penanganan kasus-kasus korupsi baik melalui pemeriksaan investigasi, melakukan penghitungan kerugian negara, dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan.

Karena hasil kerjanya sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di Indonesia, AUI dituntut menjaga integritas. Nyoman mengatakan, hal-hal nyata yang dilakukan personel AUI dalam menjaga integritas antara lain tidak menerima honor dalam bentuk apa pun.

"Jika kita punya anggaran maka kita gunakan anggaran kita sendiri. Kalau kita tidak punya anggaran maka kita tidak menerimanya meski honor itu legal," kata Nyoman.

Dalam internal AUI juga kerap dikampanyekan cara-cara menjaga integritas. Hal itu disampaikan melalui pesan di surat elektronik maupun aplikasi *Whatsapp*.

Pimpinan BPK juga menjaga ketat kualitas personel AUI. Nyoman mengatakan, pimpinan BPK meminta agar personel AUI yang menunjukkan risiko atau diragukan integritasnya harus segera dikeluarkan.

Nyoman berharap praktik di AUI bisa ditularkan ke satuan kerja (satker) lain di BPK. "Kami terbuka apabila ada satker lain yang ingin bertukar pikiran bagaimana cara BPK seluruhnya mendapat WBK," kata Nyoman.

AUI bertekad mempertahankan predikat WBK yang sudah diraih. Tak hanya itu, AUI juga menjalin kerja sama dengan Inspektorat Utama (Itama) BPK untuk menangani kasus-kasus integritas yang ada di wilayah BPK.

Nyoman berpesan kepada personel AUI untuk tidak langsung bangga dengan raihan predikat WBK. "Semestinya dari dalam kita sendiri. Kita harus betul-betul menyatakan bahwa diri kita ini sudah bebas korupsi. Jangan hanya sertifikat kita dapatkan tapi kita masih melakukan perilaku korupsi," kata Nyoman. ●

# BPK Resmikan Pembentukan IPKN



## DARI ATAS KE BAWAH

Ketua BPK Agung Firmansyah Sampurna memberikan sambutan dalam acara peresmian Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Kamis (20/2).

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjadi pembicara dalam acara peresmian IPKN.





IPKN dapat berperan menjaga profesionalisme melalui penjagaan dan penindakan atas pelanggaran kode etik profesi.

**K**etua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Agung Firman Sampurna meresmikan organisasi profesi pemeriksa yang dinamakan Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN). Menurut Agung, pembentukan organisasi profesi tersebut juga bagian dari program yang diusung BPK yakni *Accountability for All*.

“Kami menyadari betul, menjaga akuntabilitas tidak hanya semata dapat diletakkan pada pengelola keuangan negara atau pemeriksa keuangan negara, tetapi harus menjadi budaya,” kata Agung dalam sambutannya di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Kamis (20/2).

Agung menyampaikan, diperlukan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk mengajak seluruh elemen masyarakat dalam menjaga akuntabilitas.

Pembentukan IPKN diharapkan memberikan manfaat bagi pemeriksa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui penyelenggaraan seminar, *workshop*, dan pengembangan profesi. Organisasi ini juga dapat berperan menjaga profesionalisme melalui penjagaan dan penindakan atas pelanggaran kode etik profesi.

“Keberadaan IPKN juga dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan antara pemeriksa BPK dengan profesi akuntan dan auditor internal pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara,” ungkap Agung.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Pusat BPK Jakarta ini dihadiri oleh para pemegang sertifikasi Certified State Finance Auditor (CSFA) dan perwakilan berbagai organisasi profesi di Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut, mantan pimpinan BPK RI seperti Ketua BPK periode 2009-2014 Hadi Poernomo, Ketua BPK periode 2017-2019 Moermahadi Soerja Djanegara, dan Wakil Ketua BPK periode 2014-2017 Supto Amal Damandari. Dalam kesempatan tersebut, ditetapkan juga susunan Dewan Pengurus Nasional IPKN, dengan Ketua Umum Bahrullah Akbar.

Pembentukan IPKN dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi BPK sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tantangan tersebut antara lain volume keuangan negara yang jumlahnya makin besar, entitas pengelola keuangan negara yang banyak, modus penyimpangan yang beragam, serta jumlah penyimpangan keuangan negara yang relatif besar.



■ Bahrullah Akbar (tengah) usai ditetapkan sebagai Ketua IPKN.



■ Diskusi Buku “Membangun BPK Paripurna”.

BPK juga dituntut untuk selalu menjaga, menjamin, dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya sehingga dapat berperan aktif dan mampu mendorong keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK melakukan penguatan sistem dan kompetensi, salah satunya melalui penyelenggaraan sertifikasi bagi pemeriksa. Hasilnya, saat ini BPK memiliki 115 pemegang sertifikat profesi di bidang pemeriksaan keuangan negara yang disebut dengan CSFA dan menyandang gelar CSFA.

Penyelenggaraan sertifikasi profesi ini selain menjamin kompetensi pemeriksa, juga untuk merintis pembentukan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara sesuai dengan Permenpan RB Nomor 49 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa. Permenpan RB tersebut mengatur bahwa “BPK bertugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa” dan “Pembentukan organisasi profesi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri PAN dan RB diundangkan”.

Selain peresmian IPKN, juga diselenggarakan Diskusi Buku “Membangun BPK Paripurna”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari 73 orang pemeriksa BPK yang memegang sertifikasi CSFA. Buku ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembacanya mengenai pemeriksaan keuangan negara. Oleh karena itu, sasaran pembaca buku ini bukan hanya internal BPK, tetapi juga akademisi, peneliti, pelajar, dan masyarakat umum lainnya. ●

# Memagari Auditor Lewat Penegakan Kode Etik



■ Anggota III BPK, Achsanul Qosasi

Penegakan kode etik amat bergantung pada setiap individu yang ada di BPK.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi mengangkat lima anggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Sesuai amanat pasal 29 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, MKKE terdiri atas dua anggota dari internal BPK, dua dari kalangan akademisi, dan satu lagi dari profesi.

Pengangkatan ini juga ditandai pengambilan sumpah ketua dan ang-

gota MKKE dari unsur BPK, di kantor pusat BPK, Rabu (8/1). Pengambilan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 11/K/I-XI-II.2/12/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota MKKE BPK Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dari Unsur BPK dan Pengangkatan Anggota MKKE BPK Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dari Unsur BPK.

Adapun yang diambil sumpahnya

sebagai Anggota MKKE BPK dari Unsur BPK adalah Achsanul Qosasi (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota III BPK) sekaligus merangkap Ketua MKKE dan Hendra Susanto (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota I BPK).

Achsanul mengatakan, kehadiran MKKE adalah bukti upaya BPK menegakkan kode etik dan nilai-nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Namun, ia mene-

gaskan penegakan kode etik amat bergantung pada setiap individu yang ada di BPK.

“Atasan mungkin yang akan mengarahkan, mendorong staf untuk menjaga kode etik. Tapi, itu seluruhnya berasal dari sendiri,” ucap Achsanul kepada Warta Pemeriksa.

Ia meyakini seluruh auditor BPK di pusat dan daerah mengetahui kode etik yang ditetapkan. Namun, godaan di lapangan kadang sulit dihindari. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang sama antara auditor sebagai pemeriksa dengan *auditee*.

“Filosofinya harus sama. Bahwa kehadiran auditor untuk mengungkap kesalahan-kesalahan yang pimpinan atau direksi tidak tahu. Karena tidak semua pimpinan, direksi, atau kepala mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak buahnya,” ujar dia.

Achsanul mengatakan, penerapan kode etik berbanding lurus dengan kualitas pemeriksaan. Sebab, bukan tidak mungkin ada *auditee* yang berusaha mempengaruhi auditor, baik berupa jawaban yang tidak sesuai data, maupun hal-hal lainnya. Akan tetapi, dia menegaskan, auditor tidak akan tergoda pada beragam iming-iming yang ditawarkan apabila telah mengetahui dan menerapkan kode etik.

Ia menjelaskan, MKKE memiliki empat kewenangan. Pertama, menegakkan kode etik dan menindaklanjuti adanya laporan. Kewenangan kedua memeriksa terlapor.

Ketiga, MKKE memutuskan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. Terakhir, MKKE menetapkan sanksi apabila ada pelanggaran kode etik. “Kita pada dasarnya pasif, dan aktif adalah yang melaporkan, kami tidak ingin kesannya mencari-cari kesalahan karyawan. Lagipula sudah ada Inspektorat Utama yang mengawasi,” ucap dia.

### Pencegahan

Anggota MKKE yang juga Anggota I/ Pimpinan Auditorat Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto menilai, pelaksanaan pengambilan keputusan di MKKE sudah berjalan baik. Meski begitu, ia berharap rentang waktu sidang yang dilaksanakan MKKE semakin berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada sama sekali. Dengan begitu, kata dia, proses pembinaan yang dilakukan oleh atasan ataupun lewat pendidikan dan pelatihan berjalan baik.



■ Anggota I BPK, Hendra Susanto

”

Saya sebagai orang yang lahir dalam BPK berharap MKKE tidak pernah bersidang. Artinya bila tidak ada sidang, sama artinya dengan *zero defects*, artinya pembinaan kita kepada perilaku, integritas, independensi, dan profesionalisme itu berjalan dengan baik.



“Saya sebagai orang yang lahir dalam BPK berharap MKKE tidak pernah bersidang. Artinya bila tidak ada sidang, sama artinya dengan *zero defects*, artinya pembinaan kita kepada perilaku, integritas, independensi, dan profesionalisme itu berjalan dengan baik,” tutur Hendra yang sebelumnya menjabat Kepala Auditorat IB Auditorat Keuangan Negara I.

Sebagai orang yang sudah lebih dari 20 tahun di BPK, dengan terus meningkatnya remunerasi, reformasi birokrasi, dan kesejahteraan pegawai yang terus meningkat, diharapkan tidak akan ada lagi sidang MKKE karena adanya pelanggaran oleh pemeriksa BPK.

Hendra menginginkan agar MKKE tidak lagi menjadi penjaga terakhir dari proses berjalannya kode etik di BPK. Namun juga ikut terlibat dalam proses pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik.

Dalam sidang terakhir ia mengusulkan agar pegawai yang dihukum dengan larangan melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu satu atau dua tahun, diikutsertakan dalam sistem pencegahan pelanggaran.

“Saya usulkan agar pegawai yang satu atau dua tahun di-*grounded*, memiliki kewajiban untuk ikut sosialisasi kode etik di lingkungan BPK. Ia akan memberikan testimoni mengenai proses dirinya melakukan tindakan melanggar dan masa hukumannya,” ucap dia.

Selain sebagai sanksi sosial, proses ini akan menjadi pembinaan kepada pegawai terhukum. Sementara di saat yang sama, karyawan tersebut bisa menjadi agen perubahan.

Selain itu, ia mengaku juga sudah mengusulkan kepada panitera, pegawai yang menerima hukuman ditampilkan di sistem informasi sumber daya manusia (SISDM) BPK, baik inisial dan masa hukumannya. Sehingga, seluruh pegawai BPK mengetahui hukuman yang diterima bagi melanggar kode etik.

Hanya saja, ujar dia, bila sudah selesai masa hukumannya, pegawai



■ Inspektur Utama BPK, Ida Sundari

itu diberikan kembali apa yang ia miliki sebelumnya. “Sehingga terangkat kembali harkatnya sebagai pegawai BPK,” ujar dia.

### Sosialisasi entitas

Inspektur Utama (Irtama) BPK Ida Sundari menjelaskan, kehadiran MKKE untuk menegakkan martabat dan citra pegawai BPK. Irtama yang bertugas sebagai panitera untuk membuat laporan. Laporan tersebut bisa berupa pengaduan, hasil laporan pemeriksaan dari Irtama, atau telaah dari informasi media massa.

Hanya saja, kata dia, hal yang lebih penting lagi adalah kode etik BPK juga harus diketahui oleh pihak yang diperiksa atau auditee. Oleh karena itu, panitera pun selalu melaksanakan sosialisasi-

sasi-sosialisasi kepada pihak eksternal, yaitu kepada entitas dan *auditee*.

“Sosialisasi yang kami gelar dihadiri gubernur seperti di DKI Jakarta, NTT, Sulawesi Utara dimana kami juga mengingatkan kembali soal aplikasi *whistle blower* yang kami miliki dan soal gratifikasi,” ucap dia.

Panitera pada tahun ini juga sudah membuat jadwal sosialisasi ke daerah-daerah untuk mengingatkan kembali para entitas soal kode etik BPK. Sehingga, bukan hanya auditor yang menjalankan kode etik, namun juga yang diperiksa bisa mengetahui rambu-rambu kode etik yang dimiliki BPK.

“Dengan para pelaksana mengimplementasikan kode etik, hasilnya akan jauh lebih baik dan mendukung visi dan misi BPK,” ungkap dia. ●

# ALUR PERMINTAAN INFORMASI



Pusat Informasi dan Komunikasi  
Badan Pemeriksa Keuangan  
(PIK BPK)  
Jl. Gatot Subroto Kav. 31  
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000  
ext. 3912  
Fax : (021) 5795 0288  
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id  
PO.BOX : 4300 JKT 10043  
Website : www.bpk.go.id

Waktu Pelayanan  
Senin - Jumat :  
Pukul 09.00 - 15.00 WIB  
  
Istirahat  
Senin - Kamis :  
Pukul 12.00 - 13.00 WIB  
Jumat :  
Pukul 11.30 - 13.00 WIB



Masyarakat  
◆ Datang langsung ke PIK  
◆ Via Telepon  
◆ Via Fax  
◆ Via PO BOX  
◆ Website



#### Persyaratan

- ◆ Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
- ◆ Melampirkan:
  - Identitas diri (KTP)
  - Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
  - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)



Petugas PIK akan mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta, kemudian memproses Permintaan Pemohon Informasi

Syarat Lengkap ✓



#### Bila persyaratan sudah lengkap

Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

Syarat Tidak Lengkap ✗



#### Bila persyaratan belum lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

SERI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

# Strategi Promosi Diri



■ OLEH **HELMI MANAF**  
 TENAGA AHLI KETUA BPK RI  
 PENULIS PERNAH BEKERJA DI DALE CARNEGIE INDONESIA

Secara umum promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dari sebelumnya, diiringi dengan tanggung jawab dan peningkatan status berupa gaji, tunjangan serta status sosialnya.

**D**orongan utama seseorang untuk bekerja adalah untuk mendapatkan pendapatan. Seiring dengan itu pula, sudah menjadi sifat dasar manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi. Seseorang yang bekerja sebagai karyawan di suatu institusi,

maka jalannya mendapatkan kesempatan untuk promosi (naik pangkat).

Menurut Sondang P Siagian (1999:169) dalam buku: Manajemen Sumber Daya Manusia: "Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatnya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilan-

nya pun lebih besar pula".

Secara umum promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dari sebelumnya, diiringi dengan tanggung jawab dan peningkatan status berupa gaji, tunjangan serta status sosialnya.

Berikut silakan diisi daftar kontrol diri, sejauh mana strategi promosi Anda.

## Daftar Kontrol Diri: Apa Strategi Promosi Anda?

**Petunjuk:**

Periksalah strategi promosi Anda dengan menjawab pertanyaan berikut:  
 Pakai skala: 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=setuju dan 4=sangat setuju.

1	Saya mempunyai keinginan keras untuk dipromosikan
2	Saya mempunyai posisi/level tertentu yang ingin saya capai dalam 10 tahun ke depan
3	Saya menentukan rencana pelatihan dan pendidikan yang akan menunjang untuk mencapai sasaran promosi
4	Saya memprioritaskan waktu, untuk menjamin tercapainya persyaratan pelatihan dan pendidikan penunjang promosi
5	Saya akan melatih diri dengan menerima tambahan tanggungjawab dalam pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktu sebelum dan sesudah bekerja
6	Saya aktif dalam kegiatan institusi dan aktivitas sosial di dalamnya
7	Saya berusaha keras untuk membina hubungan yang harmonis baik pada bawahan, kawan satu level dan atasan
8	Saya menghabiskan sebagian besar waktu kerja saya dalam kegiatan yang paling mendukung sasaran kinerja saya
9	Saya sering kali membayangkan sukses dalam menyelesaikan pekerjaan
10	Saya biasanya mendekati pekerjaan yang sulit dan menganggap tidak mungkin gagal
11	Saya menyadari bahwa ada waktunya institusi, tidak dalam posisi untuk membuat promosi
12	Saya memeriksa kemajuan kinerja diri per tahun dan membuat rencana perbaikan yang diperlukan

**Jawaban Daftar Kontrol Diri :**

Jumlahkan nilai total Anda

**40 atau lebih** = Strategi promosi yang lebih baik

**34 sampai 39** = Strategi di atas rata-rata

**26 sampai 33** = Strategi di bawah rata-rata

**25 ke bawah** = Strategi yang buruk





unsplash.com

Berdasarkan hal tersebut di atas, promosi bagi seseorang karyawan adalah hal yang penting tidak hanya bagi dirinya tapi bagi institusinya. Berikut ini, diuraikan ada 12 Langkah Strategi Promosi Diri sebagai bagian menyusun rencana sukses karir dalam bekerja.

### 1. Motivasi untuk Promosi

Sebagian orang yang dapat mencapai promosi dalam karirnya, karena dalam dirinya sendiri mempunyai motivasi yang kuat untuk mengejar promosi yang diinginkannya. Keinginan mendapatkan promosi yang kuat sangat, harus didorongan dengan motivasi yang besar.

Dengan kata lain, tidak perlu berkeliling membicarakan promosi kepada semua orang yang ditemui, namun didalam diri harus sudah tertanam cita-cita yang kuat untuk naik ke jenjang level yang lebih tinggi.

### 2. Tentukan Sasaran Pribadi

Langkah kedua, dengan membuat sasaran pribadi berdasarkan waktu pencapaian. Apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun ke depan? 10 tahun ke depan? serta 15 tahun ke depan? Dengan membuat skala waktu (jangka pendek, menengah dan jangka panjang), maka akan memberikan batasan sampai kapan target sasaran tersebut dicapai. Selanjutnya menentukan kemampuan apa saja yang dibutuhkan

untuk menunjang kinerja di posisi tersebut.

### 3. Mengaktifkan Rencana Pendidikan dan Pelatihan

Kombinasi antara motivasi dan sasaran waktu pencapaian promosi tidaklah cukup, harus diisi dengan pembobotan kapasitas dengan mengaktifkan rencana Pendidikan dan pelatihan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja diri, yang selanjutnya ditempa melalui Pendidikan dan pelatihan sehingga nanti akan mampu bekerja setelah mendapatkan promosi.

Implementasi mengaktifkan rencana Pendidikan dan pelatihan ini, harus nyata dalam bentuk alokasi waktu dan prioritas pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang akan menunjang promosi karir ke depan. Manajemen waktu sangat dibutuhkan, sebab waktu yang tersedia hanya 24 jam per hari, tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan harus mengambil porsi khusus dalam waktu setelah waktu kerja, disamping kegiatan-kegiatan lain di luar pekerjaan.

### 5. Terima Tanggung Jawab Lebih

Banyak juga orang-orang bekerja "apa adanya saja", hanya sesuai dengan *job description*, serta cenderung meng-

hindari terhadap tambahan tanggung jawab pekerjaan. Kondisi bekerja "pas-pasan" begini, akan sulit mendapatkan memperoleh promosi. Untuk itu, persiapkan dan biasakan diri untuk menerima tanggung jawab pekerjaan yang lebih dari biasanya. Indikasi tidak bisa dilihat dengan datang lebih pagi dan pulang lebih larut, tapi dari beban dan tanggung jawab pekerjaan yang lebih.

### 6. Partisipasi Aktif Kegiatan Institusi dan Sosialnya

Banyak pengusaha yang berhasil dalam mengembangkan bisnisnya, yang diawali dari hobi atau kesenangan tertentu sehingga berkembang jadi usaha. Bagaimana dengan seorang karyawan, terutama karyawan dari institusi milik negara misalnya?. Salah satu kuncinya, yakni aktif dalam kegiatan yang diadakan institusi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pekerjaan pokok, termasuk kegiatan-kegiatan sosial didalamnya. Pada institusi yang besar, biasanya terdapat kumpulan orang-orang yang menangani sesuai bidang kesenangan dan hobi misalkan, bidang: olahraga, fotografi, penyayang binatang dan pencita tanaman, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan-kegiatan insidental lainnya, yang bersifat sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh institusi, misalkan penyaluran bantuan pendidikan, bahan makanan untuk bencana alam, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Dari sini juga Anda dapat memulai mengembangkan bakat kepemimpinan diri dalam berorganisasi, serta berperan aktif pada ajang kegiatan sosial yang diselenggarakan institusi Anda untuk masyarakat.

### 7. Mengelola Hubungan Baik

Seseorang dapat maju pesat dalam karirnya, sebenarnya tidak hanya ditunjang dengan kemampuan teknis terkait pekerjaan saja, namun lebih dari itu ada faktor non teknis yang sangat penting adalah mengelola hubungan baik antar karyawan. Betapapun hebatnya Anda, namun tidak akan pernah berhasil jika kemampuan mengelola hubungan

baik sesama karyawan dianggap buruk. Bawahan, rekan sekerja hingga atasan dapat menjatuhkan Anda. Tidak heran jika ada pemimpin yang terpilih, karna pandai bergaul dan dapat diterima oleh semua pihak. Kemampuan ini sangat diperlukan terlebih untuk seseorang yang bekerja di institusi milik pemerintah, dimana faktor “kedekatan” terutama dengan atasan sangat menentukan posisi, seperti kata pepatah “tak kenal maka tak sayang”. Dekat secara emosional dengan atasan, yang elegan dapat dilakukan dengan cara memberikan atensi lebih atas apa yang diinginkan oleh atasan.

*“Anda tidak pernah akan berhasil, tanpa membina hubungan yang baik...”*

### 8. Berorientasi Pada Hasil

Suatu ketika seorang Ayah sangat yang mengkuatirkan anaknya gagal dalam menempuh pendidikan Doktoral, di suatu universitas terkemuka di Jakarta, lantaran anak dianggap “lamban” menyelesaikan tesisnya. Berkatalah si Ayah yang bijak itu kepada anak: “Orang yang sukses itu, adalah orang yang mengerjakan dan menyelesaikan tesisnya hingga selesai dengan baik”. Ucapan singkat ini rupanya terus melekat di benak si anak itu, dan akhirnya dia bergegas merampungkan Thesis tersebut hingga berhasil meraih gelar doktornya. Apupun keahlian Anda dalam membuat rencana dan terus berkutat untuk menyempurnakannya, hingga batas ujung akhir belum juga selesai maka hal ini akan menjauhkan pada keberhasilan. Membuat sasaran keberhasilan yang berorientasi pada hasil akhir, tentu juga harus taat pada proses yang terus bergerak maju.

### 9. Bayangkan Kesuksesan Anda

Programlah diri Anda untuk menuju sukses, dengan cara membuatlah keberhasilan yang direncanakan. Orang orang yang sukses seringkali membayangkan diri mereka sukses, sebelum kesuksesan itu datang kepadanya. Mereka membayangkan bagai-

mana pekerjaan terselesaikan dengan baik, dan membayangkan hal tersebut berulang-ulang kali dalam angannya. Makin detil bayangan tersebut, maka makin baik.

*“Programlah diri Anda untuk menuju sukses, dengan cara membuat keberhasilan yang direncanakan...”*

### 10. Kembangkan Sikap Sukses

Orang yang sukses akan selalu antusias dan optimis. Bila ada masalah, dengan berkeyakinan penuh dapat mencari solusi yang terbaik. Sanggup berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan dan mengkuatirkan suatu kegagalan, sedangkan pekerjaannya sendiri belum dilaksanakan.

### 11. Periksa Kemajuan dan Lakukan Perbaikan

Seseorang pemimpin yang cakap, akan selalu menyiapkan langkah antisipasi ke2 (plan B), sebagai antisipasi jika rencana A (plan A) tidak berjalan tepat seperti yang Anda kehendaki. Selanjutnya, paling tidak perlu 1 tahun sekali untuk membuat “evaluasi diri” terhadap jalannya rencana yang Anda telah jalani, serta membuat koreksi penyesuaian agar rencana tersebut tetap konsisten menuju tujuan akhir keberhasilan.

### 12. Doa

Setelah melakukan segala daya dan upaya, maka upaya terakhir adalah dengan berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan dengan cara berdoa. Dengan berdoa akan membuat hati menjadi tenang. Kita juga berkeyakinan, dengan berdoa Tuhan akan memperlancar urusan dan mendapatkan rejeki yang berkah, serta menghindarkan dari hal-hal yang buruk. Dan doa juga diyakini dapat mengubah takdir, nasib dan kondisi kehidupan seseorang.

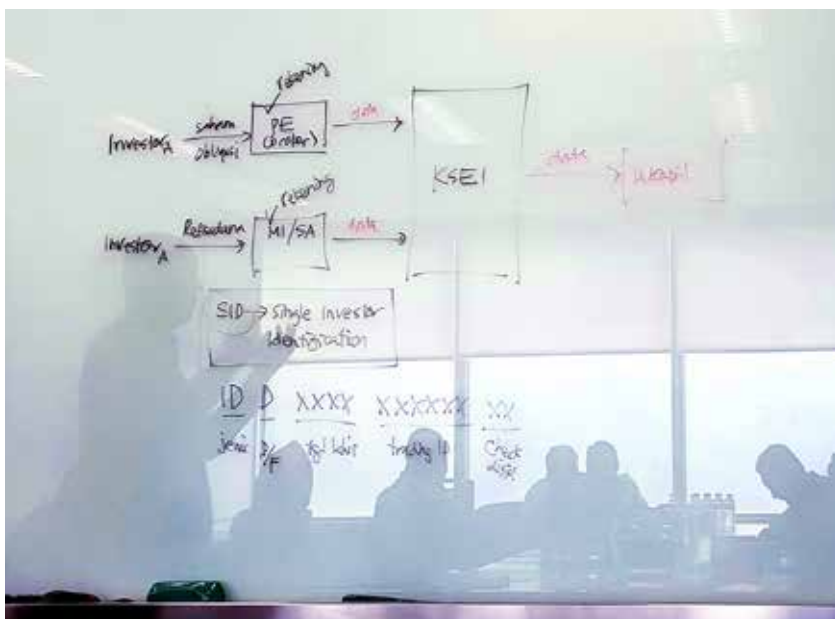
Semoga pendekatan-pendekatan di atas dapat menambah keyakinan Anda, untuk maju dan berkarya hingga hingga mendapatkan posisi yang lebih baik. “Mulailah mengambil aksi...” ●

### Daftar Pustaka

- \* Carnegie, Dale, 2015. Enhance Your Life by Becoming an Effective Leader, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2015.
- \* Carnegie, Dale, Et All, 1996. Pemimpin dalam Diri Anda, Jakarta: 1996.
- \* Megginson, David. 1997. The Fast Track MBA Series – Human Resource Development. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- \* Purba, Anthonius. 1995. Sistem Penggajian Imbal Jasa, Uraian Perencanaan Skala Gaji dan Implementasi. Jakarta: Grasindo.
- \* Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- \* Steinberg, R.J. 2005. Menangkap Peluang Tersembunyi, R.J. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- \* Too, Lilian. 1995. Strategi Sukses dalam Karir. Jakarta: Elekmedia Komputindo.
- \* Williams, Stephen. 1997. Managing Pressure for Peak Performance. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email [wartabpkri@gmail.com](mailto:wartabpkri@gmail.com) dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.



## Juara 1 Lomba Foto BPK 2020 Kategori Pemeriksaan

### Sesi Diskusi dalam Pemeriksaan Kinerja

Fotografer:  
Catur Setiawan – AKN V

## Juara 2 Lomba Foto BPK 2020 Kategori Pemeriksaan

### Pemeriksaan Fisik Infrastruktur

Fotografer:  
Chandra Setya Kusuma –  
BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara



## Juara 3 Lomba Foto BPK 2020 Kategori Pemeriksaan

### Audit di Tapal Batas

Fotografer:  
Degitarius Christy Biantong – AKN IV







Juara 1  
Lomba Foto BPK 2020  
Kategori Nonpemeriksaan

**Pulau Padar, Taman Nasional Komodo**

Fotografer:  
Maryanto Eko Hartanto – BPK RI



Juara 2  
Lomba Foto BPK 2020  
Kategori Nonpemeriksaan

**Hooraaay!**

Fotografer:  
Ade Rakhmawan –  
BPK RI Perwakilan Prov. Jawa Timur

Juara 3  
Lomba Foto BPK 2020  
Kategori  
Nonpemeriksaan

**Keseharian masyarakat Ternate dan sekitarnya, mereka menggunakan alat transportasi laut untuk menyeberang.**

Fotografer:  
Bare Kingkin Kinamu –  
BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara





30 Januari 2020

Audiensi Direksi BPJS dengan Pimpinan BPK RI.



27 Januari 2020

Diklat Kehumasan dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.



7 Februari 2020

Entry meeting Anggota I BPK Hendra Susanto dengan Kejagung.



29 Januari 2020

Entry Briefing BPK RI dengan KPR, dihadiri oleh Anggota I BPK Hendra Susanto.

30 Januari 2020

Entry meeting Anggota VI BPK Harry Azhar Azis dengan Direktur BPJS.







30 Januari 2020

Entry meeting Anggota I BPK Hendra Susanto dengan TNI AD pada acara Rapim TNI AU di Puri Ardhya Garini.



29 Januari 2020

Entry meeting Anggota I BPK Hendra Susanto dengan TNI AD pada acara Rapim TNI-Polri di GOR Ahmad Yani.

20 Januari 2020

Kunjungan Soft Tennis ke Anggota IV BPK Isma Yatun.







16 Januari 2020

Anggota V BPK Bahrullah Akbar saat berziarah ke makam mantan Ketua BPK, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di Yogyakarta.



13 Februari 2020

Anggota I BPK Hendra Susanto saat menghadiri pemakaman JB Sumarlin (Ketua BPK RI periode 1993-1998) di San Diego Hills.

17 Januari 2020

Pimpinan bersama pegawai BPK melakukan ziarah makam mantan Pimpinan BPK terdahulu, di TMP Kalibata.



16 Januari 2020

Peresmian Pusat Pelayanan Konsultasi Pegawai BPK dan Taman Penitipan Anak (TPA) Tunas Bangsa oleh Anggota V BPK Bahrullah Akbar.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

*Semakin mudah  
mengakses informasi melalui*



**BPK RI Official**



**www.bpk.go.id**



**@bpkri**



**@bpkriofficial**



**Tugas BPK**

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.